

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PELALAWAN (STUDI INDUSTRI BATIK BONO)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Fharadila Anwar
NPM : 157110201

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

**“PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PELALAWAN (STUDI INDUSTRI BATIK BONO)”**

ABSTRAK

Fharadila Anwar

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan, Industri

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan tugas pembinaan Industri Kecil Menengah kepada Industri Batik Bono yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Seperti bagaimana teknis dilapangan dan siapa pelaksananya. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat pelaksanaan pembinaan dari beberapa sudut pandang, yakni pengawasan Industri, Pengendalian Industri, Pengelolaan Industri, serta Peningkatan Kualitas Industri. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) belum efektif. Teknik pengukuran yang digunakan yakni dengan menggunakan Skala Linkert melalui pendekatan dengan memberi skor nilai untuk setiap kategori ukuran. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan survey deskripsif dimana peneliti menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Populasi dan sampel pada penelitian ini yakni seluruh pegawai Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri dan seluruh pengrajin batik Rumah Batik Andalan dengan menggunakan teknik seksus. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer berupa yang diperoleh langsung dari responden yakni Kepala Dinas, Kepala Perindustrian, Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri serta seluruh Pengrajin batik Rumah Batik Andalan. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi resmi pemerintah yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Rumah Batik Andalan. Lebih lanjut teknik dalam pengumpulan data peneliti menggunakan kuisisioner, wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) dapat disimpulkan pelaksanaan nya berada pada rentang skor 93 dengan kategori Kurang Terlaksana maka dapat dijelaskan berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui pelaksanaan dari pembinaan Industri Batik Bono belum terlaksana dengan baik.

**“THE IMPLEMENTATION OF THE TASK OF FOSTERING THE
COOPERATIVE SERVICE, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,
INDUSTRY AND TRADE OF PELALAWAN REGENCY (STUDY OF THE
BONO BATIK INDUSTRY”**

ABSTRACT

Fharadila Anwar

Key word : implementation, fostering, industry

The purpose of this study is to find out the implementation of task of fostering small and medium industries to the Bono batik industry carried out by the industry guidance and supervision section The Cooperative Service, Small And Medium Enterprises, Industry And Trade Of Pelalawan Regency. Such as how technical is in the field and who is implementing it. This research was conducted by looking at the implementation of coaching from several perspective, namely industrial supervision, industrial control, industrial management, and industrial quality improvement. Hypothesis in this research, it is suspected that the implementation of fostering tasks The Cooperative Service, Small And Medium Enterprises, Industry And Trade Of Pelalawan Regency(Study of The Bono Batik Industry) not yet effective. Measurement techniques used namely by using a linkert scale through and approach by giving score scores for each size category. In its implementation the reseachers conducted data analysis using descriptive surveys where the researcher describes the actual situation about what happened during the study by collecting data,classify and analyze so that the analysis formulation is obtained the problems faced can then be drawn a conclusion. Population and sample in this study namely all employees of the guidance and supervision section of the industry and all batik artisans in the mainstay batik house by using cencus techniques. In this study the type of data used is the pimary data in form of those obtained directly from the respondent namely the head of service, head of the industry sector, head of the industry guidance and supervision section, and all batik artisans in the mainstay batik house. While secondary data in the form of books, official government decumentation, obtained from The Cooperative Service, Small And Medium Enterprises, Industry And Trade Of Pelalawan Regency and the mainstay batik house. Further techniques in collecting research data using a questionnaire, interview and obsevation directly to the field. Based on the results of research that researchers have done about The Task Of Fostering The Cooperative Service, Small And Medium Enterprises, Industry And Trade Of Pelalawan Regency (Study Of The Bono Batik Industry it can be concluded that the implementation is in the range of score 93 with the less implemented category it can be explained based in the results of reseaechers in the field it's known that the implementation of the Bono batik industry fostering has not been implemented properl.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono)”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan Skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr. H. Moris Yogia, M.Si selaku Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan teliti sebagaimana seharusnya penulisan skripsi dan telah menyediakan waktu serta memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta motivasi yang diberikan kepada Penulis untuk kebaikan hasil akhir dari proses penulisan skripsi.
5. Bapak Arief Rifa'i, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Eko Handrain, S.Sos., M.Si yang selalu memberikan arahan, saran dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.

8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Yang telah banyak membantu di bidang administrasi.
9. Kepada bapak H. Fakharizal selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Kemudian Kepada bapak M. Hasbi selaku Kepala Bidang Perindustrian dan kepada bapak Dedy Kurniawan selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri. Serta seluruh responden yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan izin pengambilan data dan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan penelitian ini.
10. Terimakasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Anwar dan ibunda tercinta Ratna Sari yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungannya dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S.1) bidang Ilmu Administrasi Publik. Serta untuk kakanda Zam-zam Gunawan Hasibuan,SP, Evida, dan Yogi Riandi, yang tiada henti memberikan dorongan atau semangat kepada penulis.
11. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada rekan-rekan sepermainan Tyo Ardiyansyah, Septia Rima Ariza, Novy Tarida, Karma Sanjaya, Nurwidiya Saputra, Ratna Sari, Rifky Hardian Pratama, Ratna Juwita, Mardi yang telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan skripsi ini. Terimakasih

sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat-saat direpotkan.

12. Dan kepada yang lainnya yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membeikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Amin..

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 22 Juli 2019

Penulis,

Fharadila Anwar

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 15 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 17 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 17 |
| 1. Konsep Administrasi Publik | 17 |
| 2. Konsep Organisasi | 20 |
| 3. Konsep Manajemen..... | 23 |
| 4. Konsep Pelaksanaan..... | 26 |
| 5. Konsep Pembinaan..... | 38 |
| 6. Konsep Agen Pemberdayaan | 31 |
| 7. Konsep Industri Kecil Menengah..... | 32 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| C. Hipotesis..... | 35 |
| D. Konsep Operasional | 36 |
| E. Operasional Variabel..... | 39 |
| F. Teknik Pengukuran | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 47 |
| A. Tipe Penelitian | 47 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Populasi dan Sampel | 48 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 49 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 49 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 52 |
| BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | 53 |
| A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 53 |
| B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 55 |

| | |
|---|------------|
| C. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan | 61 |
| 1. Kedudukan | 61 |
| 2. Tugas | 62 |
| 3. Fungsi | 62 |
| D. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas | 63 |
| E. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan | 78 |
| F. Sejarah Ringkas Rumah Batik Andalan | 79 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 81 |
| A. Identitas Responden | 81 |
| 1. Jenis kelamin | 82 |
| 2. Usia Responden | 82 |
| 3. Pendidikan Responden | 84 |
| B. Pelaksanaan Tugas Pembinaan Industri Batik Bono Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan | 86 |
| 1. Pengawasan | 86 |
| 2. Pengendalian | 91 |
| 3. Pengelolaan | 95 |
| 4. Kualitas | 100 |
| BAB VI PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 110 |
| LAMPIRAN | 113 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| I.1 | : Jumlah pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan dan Gang. 2000 tahun 2013 - 2018..... | 5 |
| II.1 | : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono)..... | 39 |
| III. 1 | : Jumlah Populasi dan Sampel pada Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono)..... | 49 |
| IV.1 | : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016..... | 56 |
| IV.2 | : Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan Tahun 2016 | 57 |
| IV.3 | : Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016 | 57 |
| IV.4 | : Kondisi Existing Sumber Daya PTT Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016.. | 57 |
| IV.5 | : Kebutuhan SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| I.1 : Bagan Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Pelalawan..... | 9 |
| I.2 : Standar Operasional Prosedur Pembinaan Industri Kecil Menengah | 11 |
| II.1 : Bagan Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) | 35 |
| IV.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 79 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. : Daftar kuisisioner penelitian untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Pelalawan..... | 113 |
| 2. : Daftar kuisisioner penelitian untuk Pengrajin batik Rumah Batik Andalan..... | 119 |
| 3. : Daftar wawancara untuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 125 |
| 4. : Daftar wawancara untuk Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 127 |
| 5. : Daftar wawancara untuk Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan..... | 129 |
| 6. : Daftar wawancara untuk ketua Pengrajin Batik Rumah Batik Andalan..... | 131 |
| 7. : Tabel Telly mengenai data penelitian..... | 133 |
| 8. : Foto dokumentasi hasil observasi | 134 |
| 9. : Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR Penetapan Dosen Pembimbing..... | 140 |
| 10. : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi | 141 |
| 11. : Surat Mohon Izin Pra-Survey | 142 |
| 12. : Surat Mohon Rekomendasi Riset | 143 |
| 13. : Surat Rekomendasi Riset DPMPTSP Provinsi Riau | 144 |
| 14. : Surat Rekomendasi Riset DPMPTSP Kabupaten Pelalawan | 145 |
| 15. : Surat keterangan Penelitian dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan | 146 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cabang ilmu sosial ialah Administrasi, Ilmu administrasi membicarakan kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Siagian mengatakan administrasi sebagai kerjasama dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya didalam organisasi. Dapat kita pahami bahwa banyak hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan kata lain administrasi sangat berperan penting dalam pencapaian kebutuhan manusia yang diperoleh melalui kerjasama.

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari batasan ini dapat diungkap tiga ide pokok yakni sebagai berikut :

- a. Administrasi adalah rangkaian kegiatan
- b. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka kerjasama kelompok
- c. Kerangka kerjasama kelompok itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Secara ringkas administrasi merupakan proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan.

Berbicara masalah administrasi tentunya tidak dapat terlepas dari organisasi. Sementara itu organisasi menurut Luther Gulick dapat didefinisikan sebagai alat yang saling berhubungan dengan satuan-satuan kerja yang menempatkan mereka kepada orang-orang yang dalam struktur kewenangan. Jadi, dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan tempat terselenggaranya administrasi, lalu didalam organisasi terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar, kemudian terjadinya kerja sama dan pembagian tugas, hingga berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Organisasi bertugas mengkreasikan nilai bagi lingkungan tempatnya eksis. Dan untuk membuatnya mampu mengkrasikan nilai yaitu manajemen. Organisasi harus dimanajemeni agar dapat menjalankan misinya. Menurut Ordway Tead manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah “perangkat” yang dimaksud dalam pandangan ini adalah pemimpin organisasi.

Dengan kata lain manajemen merupakan serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi terutama pemimpin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara melakukannya, memahami

bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.

Berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka, salah satunya yaitu usaha pemerintah dalam mengembangkan kearifan lokal. Banyaknya kearifan lokal budaya masing-masing daerah di Indonesia membuat Indonesia kaya akan seni dan budayanya. Dengan ini pengembangan kearifan lokal merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sendi-sendi nilai kebangsaan. Yang bertujuan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Reprublik Indonesia (NKRI).

Salah satu bentuk kearifan lokal adalah batik sebagai industri kreatif. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain industri budaya atau juga Ekonomi Kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan batik merupakan salah satu kearifan lokal atau warisan budaya sekaligus kekayaan budaya Indonesia yang telah lama dikenal tidak hanya lingkup nasional, tetapi juga dunia internasional. Pada sektor industri kreatif merupakan sektor yang potensial, usaha pengembangan batik sebagai industri kreatif diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, karena batik sebagai industri kreatif yang dapat mendorong pengembangan daerah,

memperkenalkan alam, nilai, dan budaya bangsa yang beranekaragam serta memupuk rasa cinta tanah air dalam memperkokoh persatuan bangsa.

Contohnya terinspirasi oleh kearifan lokal Provinsi Riau saat ini khususnya di Pelalawan, memiliki “BONO” fenomena alam sebagai kearifan lokal yang teletak di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Salah satunya yaitu wisata bahari Bono. Kondisi alam Teluk Meranti memang sedikit unik, keadaan alamnya berupa dataran rendah berawa-rawa dengan lahan gambut yang cukup luas. Wilayah Teluk meranti dibelah oleh aliran sungai kampar yang bermuara ke Selat Malaka. Sepanjang aliran sungai tersebut membentang hutan lebat tropis yang sangat luas di kedua sisi sungai tersebut.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pelalawan tentang profil Kabupaten Pelalawan penduduk asli Teluk Meranti adalah suku melayu. Mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, dan kehutanan. Sementara Potensi besar yang ada di kecamatan Teluk meranti adalah di bidang pariwisata, yaitu objek wisata fenomena alamnya berupa ombak yang disebut ombak Bono yang terdapat di Sungai kampar.

Dahulunya, ombak Bono sangat ditakuti oleh masyarakat dan para pelayar yang memasuki kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan kuatnya hempasan dari ombak tersebut yang mampu menghancurkan perahu-perahu pelayar. Setelah kedatangan tim ekspedisi penjelajah sungai, fenomena tersebut dijadikan sebagai objek surfing para peselancar. Hingga sekarang banyak peselancar dunia maupun dari Indonesia yang mencoba kedahsyatan ombak Bono tersebut.

Setelah terkenal dengan keunikan gelombang Bono yang dijadikan ajang selancar oleh para turis mancanegara. Pelalawan sekarang juga sudah memiliki batik. Kerajinan batik memiliki keberagaman dan kekhasan coraknya yang biasanya melambangkan simbol-simbol budaya pada suatu daerah. Kerajinan batik Bono yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terinspirasi oleh gelombang Bono hingga melahirkan kreatifitas dengan mengambil bentuk gelombang Bono sebagai motif kain batik untuk lebih mengenalkan Pelalawan ke masyarakat luas.

Kerajinan batik di Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh kelompok usaha, dengan motif atau corak yang identik dengan simbol-simbol budaya Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan. Dan salah satunya motif yang paling populer adalah batik Bono. Adapun motif lain yaitu daun eukaliptus, daun akasia, motif lakum yaitu buah lokal yang terlihat seperti buah anggur, dan terakhir motif timun suri.

Dengan itu terdapat 2 (dua) pusat usaha kerajinan batik. Adapun kelompok usaha kerajinan batik yang berpusat di Kabupaten Pelalawan yaitu pada kecamatan Pangkalan Kerinci adalah kelompok usaha Rumah Batik Andalan (RBA) yang terletak dilingkungan pabrik RAPP tepatnya pada Balai Pelatihan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Perumahan Townset 2.

Tabel I.I Jumlah Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan tahun 2013 - 2018

| Tahun | Jumlah Pengrajin (Orang) |
|-------|--------------------------|
| 2013 | 60 |
| 2014 | 30 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 20 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 11 |

Sumber: Rumah Batik Andalan, Tahun 2019.

Dari tabel I.I menunjukkan bahwa jumlah pengrajin batik di Rumah Batik Andalan (RBA) menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 sebanyak 60 pengrajin batik lalu berkurang hingga pada tahun 2018 menjadi 11 pengrajin batik. Ini dikarenakan adanya penseleksian terhadap pengrajin batik. Mereka yang memiliki keahlian yang baik saja yang akan dipertahankan dan penyebab lain berkurangnya jumlah pengrajin juga dikarenakan pengrajin seorang ibu rumah tangga sehingga pengrajin susah untuk membagi waktu antara urusan rumah nya dengan membatik di Rumah Batik Andalan.

Rumah Batik Andalan (RBA) ini merupakan program *Community Development* (CD) dari *Riau Andalan Pulp and Paper* (RAPP) yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, anak perusahaan Indonesia dari pemimpin industri pulp dan kertas global *Asia Pacific Resource International* yang dikenal sebagai April, mulai melakukan upaya untuk memberdayakan perempuan lokal dengan memberikan mereka keterampilan baru dan membantu mereka untuk mendapatkan uang mereka sendiri.

Dimulai dengan program pelatihan batik Bono tahun 2013. Usaha program pelatihan batik Bono didukung sekitar 60 pengrajin batik. Dimana setiap perajin batik harus menguasai teknik mencating, menggambar, mewarnai, serta memiliki kreatifitas. Dan dilakukan pendampingan dimulai dari pengenalan alat hingga teknik membatik.

Sebagai komitmen PT. RAPP dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kerja yang diwujudkan dengan mendorong pemberdayaan kemandirian masyarakat yang dimulai dengan program pelatihan Batik Bono.

Hingga akhirnya terbentuk kelompok usaha batik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tahun 2013. Bentuk komitmen lainnya PT. RAPP tersebut, selain memfasilitasi pelatihan PT. RAPP juga memberikan sumbangan Rumah Batik Andalan tahun 2013 yang diresmikan PT. RAPP bersama ketua Bhayangkari Riau Santi Condro Kirono dan didampingi oleh ketua TP PKK Pelalawan serta bantuan modal kepada Rumah Batik Andalan (pembekalan ilmu tentang teknik membatik dan peralatan modal kerja).

Berkaitan dengan hal tersebut dalam perkembangan batik, perkembangannya didominasi oleh usaha dalam skala kecil dan menengah. Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) tahun 2015-2019 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri kerajinan dan batik menghadapi beberapa permasalahan produksi dan pasar, yaitu produktifitas rendah, modal yang terbatas, manajemen belum banyak diterapkan, serta terbatasnya akses informasi pasar.

Batik Bono merupakan sebuah Industri Kecil Menengah, sebab dalam kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Batik Andalan yaitu kegiatan memproduksi batik, oleh sebab itu Rumah Batik Andalan merupakan sebuah Industri Kecil Menengah dalam Bidang Industri kerajinan.

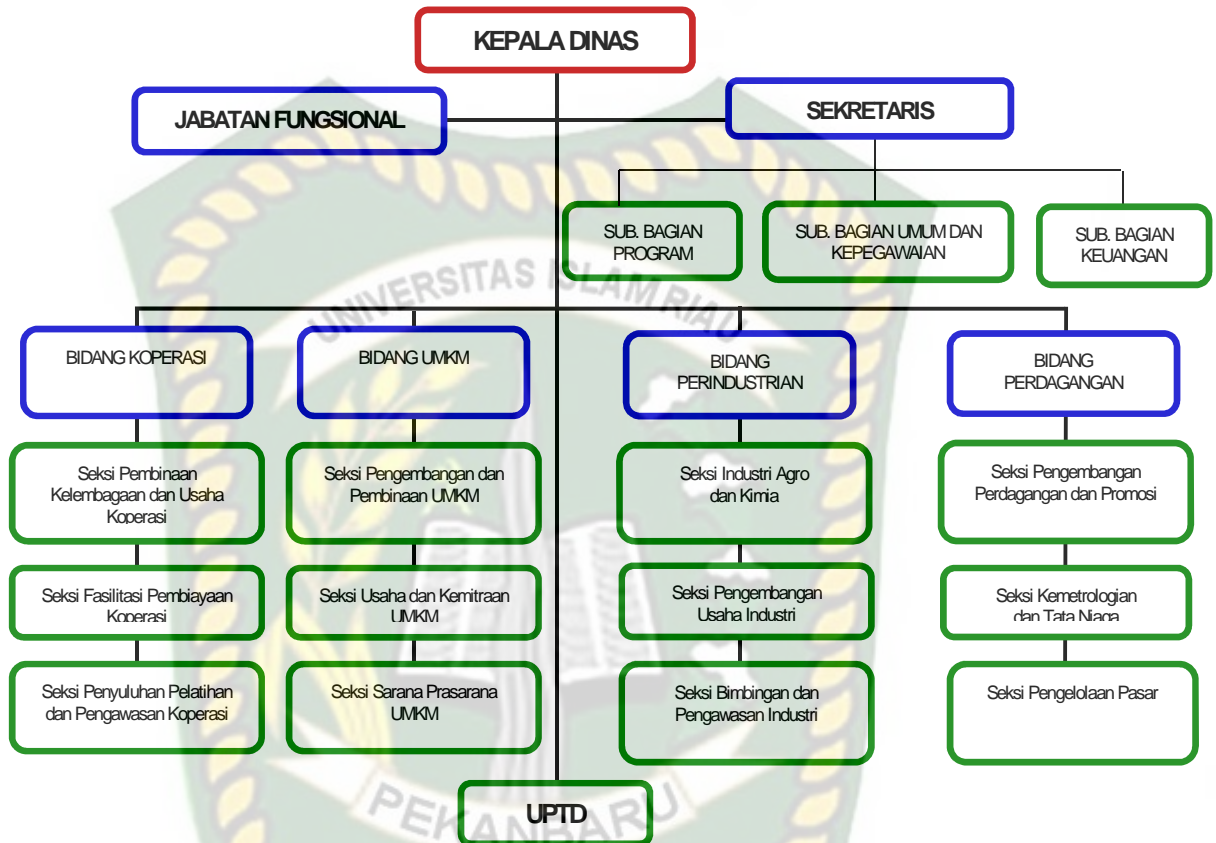
Saat ini, industri kerajinan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya bidang perindustrian. Hal ini diwujudkan dengan penetapan berbagai kebijakan untuk industri kreatif, salah satunya kerajinan batik, diantaranya melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian bahwa pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dan

inovasi masyarakat dengan melakukan penyediaan ruang dan wilayah dalam berkefektifitas dan berinovasi, sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, perlindungan HaKI serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif didalam dan luar negeri.

Oleh sebab itu ini jelas sudah menjadi tugas oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu melakukan pembinaan terhadap Industri batik Bono. Menurut Abd. Rohman pelaksanaan adalah langkah penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pelaksanaan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi nyata pada organisasi, seperti perwujudan pertumbuhan dan perkembangan organisasi.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pembinaan, dukungan kebijakan Industri Kecil dan Menengah, secara khusus juga dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Yang mana struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan, 2019

Dan bagian yang melakukan Pembinaan Industri Kecil Menengah yaitu Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Meyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri kecil menengah;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri kecil menengah;
- Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan Intelektual (HaKI) pada Industri kecil menengah;
- Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi sesuai sni,

barcode.

- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengawasan Industri;
- i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

Pembinaan Industri Kecil Menengah merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 yang termasuk pada Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang didalam program dijelaskan kegiatannya yaitu melaksanakan fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah, pencapaian standarisasi, penerapan IKM, fasilitasi kerjasama kemitraan Industri Kecil Menengah dengan swasta, serta pembinaan dan Monitoring IKM. Pelaksanaan tugas pembinaan berperan penting dalam struktur industri, dan menghasilkan barang atau jasa yang layak dengan melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

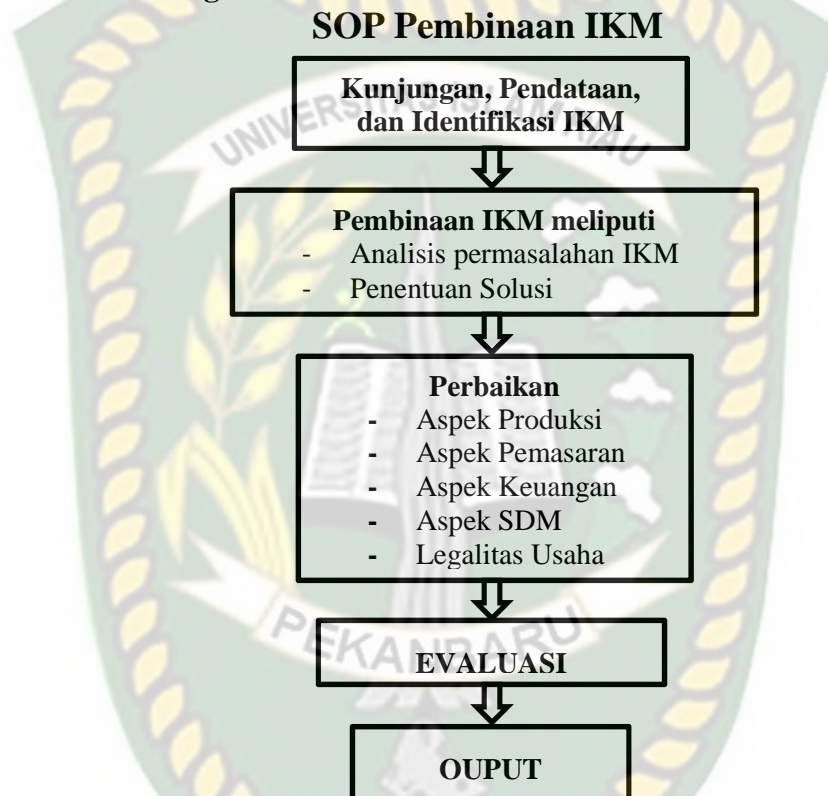
Pelaksanaan tugas pembinaan sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam membantu Industri Kecil Menengah (IKM). Pembinaan sebagai bagian dari paradigma pembangunan yang fokus perhatiannya kepada semua aspek seperti manusia dilingkungannya mulai dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi,

bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan melalui pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal (Efendi, 2012:24).

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan sebagai berikut:

Gambar I.2 Bagan Standar Operasional Prosedur Pembinaan Industri Kecil Menengah.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Tahun 2019

Uraian SOP Pembinaan Industri Kecil Menengah yang pertama ialah Kunjungan, pendataan dan identifikasi IKM dengan kelengkapan form data IKM dengan waktu 6 bulan. Kedua, pembinaan IKM meliputi analisis permasalahan IKM dan penentuan solusi dengan kelengkapan data profil dan analisis masalah IKM selama 2 bulan. Ketiga, melakukan perbaikan adapun perbaikan yang dilakukan yaitu pada aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek SDM, legalitas usaha dengan bantuan Bimtek, mesin dan peralatan serta legalitas

usaha dengan waktu 3 bulan. Keempat, evaluasi dengan mutu baku sebulan. Kelima, output yaitu menjadikan IKM mandiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis kepada Ketua Pengrajin Batik Bono dalam hal pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan pembinaan seperti yang dimaksudkan didalam SOP pembinaan. Padahal bentuk koordinasi yang terjadi antara PT. RAPP dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yaitu PT. RAPP melakukan pemberdayaan terhadap perempuan daerah diwilayah kerjanya dengan menjadi pendamping bagi para Pengrajin Batik Bono, namun bukan dalam membina Industri Batik Bono pendampingan yang dilakukan PT. RAPP yaitu memberikan bantuan modal dalam bentuk peralatan dan barang mentah yang selanjutnya di olah oleh para pengrajin dengan menghasilkan kain batik. dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang melakukan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah Batik Bono.

Adapun bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yaitu analisis permasalahan Industri Kecil Menengah kemudian penentuan solusi dari permasalahan Industri Kecil Menengah dengan memberikan pelatihan kepada pengrajin untuk meningkatkan kemampuan pengrajin dalam membatik dan berkreatifitas. Dalam hal pemberian pelatihan kepada pengrajin, selama Rumah Batik Andalan berdiri pada tahun 2013 hingga tahun 2018 pelatihan hanya

dilakukan sekali, yaitu pada tahun 2015 dengan membawa beberapa pengraji batik bono ke Yogyakarta untuk melihat teknik membatik secara langsung disana. Dan hingga kini tidak pernah ada lagi dilakukannya pelatihan untuk para pengrajin Rumah Batik Bono.

Dan dalam kunjungan sebagaimana yang dimaksud didalam SOP pembinaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya berkunjung tetapi tidak melaksanakan tugasnya, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan yaitu hanya menemani tamu yang datang dari luar untuk melihat batik khas Kabupaten Pelalawan secara langsung di Rumah Batik Andalan.

Seharusnya kunjungan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui perkembangan Industri Batik Bono seperti apa keadaannya dan permasalahan apa yang sedang dihadapi industri Batik Bono maka disinilah tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bidang Perindustrian terkhususnya Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri untuk melakukan pembinaan terhadap Industri Batik Bono sehingga dapat dilakukannya perbaikan terhadap permasalahan yang ada didalam industri Batik Bono.

Adapun bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu perbaikan dalam aspek produksi seperti memperkaya motif batik, warna untuk batik, dan teknik membatik yang baik agar tidak amburadul, aspek pemasaran seperti ikut serta sebagai *ambasador brand local* dengan mengenakan batik bono, dan ikut

mempromosikan batik bono, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia yang mana jumlah pengrajin semakin berkurang dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukannya perekrutan pengrajin batik dengan cara mencari 10 perempuan daerah disetiap desa yang berada di wilayah kerja PT. RAPP dan dilakukannya pelatihan terhadap para pengrajin, dan yang terakhir yaitu legalitas usaha. Pada tahun 2015 HaKI Batik Bono telah diberikan oleh negara melalui Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM dilindungi dengan UU No. 14 tahun 2014 tentang Hak Cipta, motif yang sudah mendapatkan HaKI yaitu motif Batik Bono, daun kayu eukaliptus dan daun akasia tanaman yang banyak ditanam PT. RAPP, motif lakum buah lokal yang terlihat seperti buah anggur, dan motif timur suri.

Dan berdasarkan wawancara kepada Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri, didalam pembinaan Industri Kecil Menengah idealnya dilakukan satu tahun 1 kali sesuai dengan SOP Pembinaan. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. sehingga dari hasil kunjungan ke Rumah Batik Andalan tidak ada pelaporan terhadap perkembangan Industri Batik Bono dalam betuk data.

Berdasarkan observasi dan sekaligus wawancara dengan Ketua Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan (RBA) dan Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan terdapat gejala-gejala atau fenomena sehubungan dengan pelaksanaan tugas pembinaan Industri Batik Bono yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugasnya tidak melaksanakan pembinaan dalam bentuk analisis masalah Industri Batik Bono serta penentuan solusi dari masalah yang terjadi pada Industri Batik Bono.
2. Berdasarkan SOP pembinaan Industri Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yaitu melakukan perbaikan dalam beberapa aspek pada Industri Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Pelalawan, tetapi tidak dengan Industri Kecil Menengah Batik Bono, seperti aspek produksi dan aspek SDM belum dilakukan secara maksimal dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul penelitian yaitu : **“Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono)?**

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian terhadap Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono) adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono).

b. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan ilmu tentang administrasi publik khususnya dibidang Pelaksanaan Tugas Pembinaan. Serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono).

2. Bagi Akademis

Sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono).

3. Bagi Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (studi industri batik Bono).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memecahkan permasalahan dan yang akan menjadi landasan dalam penelitian terutama dalam menganalisis data, diantaranya:

1. Konsep Administrasi Publik

Sacara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari 2 kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang berarti dalam bahasa Indonesia melayani atau memenuhi. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan dan pengaturan.

Ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli antara lain:

1. Herbert A Simon mendefinisikan administrasi sebagai kelompok yang melakukan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
2. Dwight Waldo mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai rasional tinggi.
3. Dimock & Dimock menyatakan bahwa administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.
4. S.P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
5. The Liang Gie adalah rangkaian pekerjaan sekelompok orang yang dilakukan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

6. Harbani Pasolong administrasi adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan terencana dengan pola bekerjasama dengan maksud mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan rasional.

Adapun ruang lingkup administrasi menurut Harbani pasolong adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik
2. Birokrasi publik
3. Manajemen publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Administrasi kepegawaian negara
7. Kinerja
8. Etika administrasi publik

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui manajemen publik dan didasari birokrasi, kepemimpinan, etika dan kinerja yang baik.

Dan Jhon M. Pfiffner dan Robert V Presthus menyatakan bahwa administrasi publik adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan dimaksud terhadap usaha sejumlah orang.

Kemudian Nicholas Henry mendefinisikan administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan promosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melambangkan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model dan perilaku birokrasi
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi dan administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

T. Keban berpendapat bahwa secara khusus kegiatan administrasi difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik

Lalu administrasi publik menurut Chandler dan Plano yaitu Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut T. Keban administrasi publik harus dilihat setidak-tidaknya dari enam dimensi strategi sebagai berikut:

1. Dimensi kebijakan
2. Dimensi struktur organisasi
3. Dimensi manajemen

4. Dimensi etika
5. Dimensi lingkungan
6. Dimensi akuntabilitas kinerja

Dan menurut Prajudi administrasi publik berarti administrasi daripada organisasi yang bersifat publik, artinya kenegaraan atau antar kenegaraan, dan atau administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang sifat kenegaraan atau antar negara. Dapat dicermati dari uraian penjelasan administrasi publik bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani "*organon*" yang berarti "alat" atau "sarana". Mendasarkan pada pengertian tersebut, penganut aliran ini mengatakan bahwa organisasi merupakan sarana (*means*) untuk mencapai suatu sasaran dalam (*ends*). Daft mengemukakan pendapat bahwa organisasi merupakan sekumpulan yang memiliki suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktifitas yang dikoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan lingkungan eksternal. Robbins menyatakan bahwa organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus berupaya mencapai suatu sasaran.

Budiharjo menambahkan bahwa semua organisasi memiliki visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran tersebut kemudian lazim dikenal sebagai keefektifan organisasi. Dalam kontek organisasi, yang perlu diperhatikan agar

sasaran tercapai secara maksimal adalah harus terukur. Artinya, dalam merumuskan sasaran dari sebuah organisasi, harus melihat kemampuan yang dimiliki dan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya, apakah sasaran tersebut nantinya akan dapat dicapai atau hanya akan menjadi slogan saja. Karena kemampuan dan berbagai faktor yang memengaruhi suatu organisasi berbeda, maka tentunya setiap organisasi juga mempunyai sasaran yang berbeda.

Wijayanti menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Paparan tersebut menegaskan adanya beberapa unsur dalam organisasi yang harus terpenuhi, yaitu unsur sistem, pola aktifitas kerjasama yang berulang-ulang, sekelompok orang, dan tujuan.

Wiajayanti menambahkan bahwa suatu organisasi terbentuk dari sekumpulan individu yang membentuk kelompok dan kelompok tersebut berkumpul membentuk suatu wadah yang disebut organisasi. Berbagai aktivitas dalam organisasi tersebut dipengaruhi faktor lingkungan dengan berbagai dinamika di dalamnya.

Herujito memberikan pengertian terhadap organisasi dengan dua cakupan yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung
2. Organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi merinci pada pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan tingkat spesialisasi dari suatu pekerjaan. Struktur organisasi juga menspesialisasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan sampai batas tertentu. Selain tersebut struktur organisasi juga menunjukkan hirarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Wewenang dalam struktur organisasi memperjelas kerja dari atasan terhadap bawahan, sedangkan pelaporan berlaku sebaliknya, yakni mempertegas pertanggung jawaban aktivitas kerja bawahan terhadap atasan.

Dari berbagai argumen di atas, pada dasarnya menunjukkan substansi yang sama, yakni organisasi harus meliputi beberapa unsur penting. Unsur penting yang dikemukakan para ahli tersebut antara lain adalah :

1. Kumpulan (entitas sosial)
2. Sistem
3. Koordinasi
4. Kerjasama
5. Tujuan/sasaran

Dengan demikian artinya organisasi dalam konteks ini dipandang sebagai suatu wadah atau sistem dimana sekumpulan orang-orang atau entitas sosial melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Sedehannya apabila organisasi dipandang sebagai suatu wadah, maka pengorganisasian merupakan pengaturan berbagai aktivitas dalam organisasi.

3. Konsep Manajemen

Dalam pengertian manajemen, Abd Rohman berpendapat ada dua pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Menurut Usman kata “manajemen” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti “tangan” dan “*agere*” yang berarti “melakukan”. Dari dua kata tersebut dengan masing-masing yang terkandung didalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya kata “*manus*” dan “*agere*” digabung menjadi suatu kesatuan kata kerja “*managere*” yang mengandung arti “menangani”. Pengertian ini dalam ilmu kebahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi. “*Managere*” diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi “*to manage*” dengan kata benda “*management*”. Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan *management* disebut *manager*. Kata “*management*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen yang mengandung arti “pengelolaan”.

Pengertian manajemen yang dikemukakan para ahli dapat ditemukan dalam banyak literatur dan merujuk pada persepsi masing-masing. Konsekuensinya adalah cenderung memunculkan pengertian yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian manajemen, sebagai berikut :

1. Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumberdaya-sumberdaya dan pembagian tugas dengan profesional.

2. Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumberdaya manusia, material, dan keuangan.
3. Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumberdaya untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan yang bervariasi (umum).
4. Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumberdaya-sumberdaya sebagai modal untuk menyelesaikan target-target organisasi.

Beberapa pandangan yang dikemukakan diatas tersebut, pada intinya merujuk pada suatu kesimpulan pokok yaitu adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koodinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional untuk mengelola sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, material, keuangan, maupun cara yang digunakan. Dalam konteks ini, profesional dimaknai sebagai bentuk pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalam organisasi tersebut. Sedangkan proposional dimaknai sebagai pembagian tugas yang seimbang antara kemampuan yang dimiliki oleh sumberdaya manusianya dengan beban kerja yang harus ditunaikan. Sehingga dengan upaya ini, setiap sumberdaya manusia yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak kelebihan beban ang akan berakibatkan pada lambannya pencapaian tujuan dimaksud bahkan terjadi kegagalan.

Wijayanti memandang manajemen secara lebih detail dengan merinci pengertian sebagai berikut:

1. Manajemen sebagai seni
 Pandangan ini mengadopsi pendapat Mary Parker Pollet, yang berpendapat bahwa manajemen merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
2. Manajemen sebagai proses
 Pandangan tersebut diadopsi dari pendapat Stoner, dimana manajemen dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya lainnya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Manajemen sebagai ilmu dan seni
 Pandangan tersebut diadopsi dari apa yang disampaikan Luther Gulick, dimana manajemen dimaknai sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perubahan serta membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
4. Manajemen sebagai profesi
 Pandangan ini diadopsi dari apa yang dikemukakan Edgar H. Schein, dimana manajemen dipandang sebagai suatu profesi yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Manajemen sebagai profesi ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:
 - a. Para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum.
 - b. Para profesional mendapatkan status mereka karena berhasil mencapai standar prestasi kerja tertentu.
 - c. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.

Pendapat lain mengenai manajemen dipandang sebagai suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya menurut George Terry. Pandangan ini menurut Abd Rohman lebih menekankan pada fungsi-fungsi yang melekat pada manajemen yang harus dijalankan dalam

pencapaian tujuan sebuah organisasi. Namun demikian disisi lain pandangan ini juga menyertakan gagasan bahwa untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi tersebut tidak lain melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya yang memiliki organisasi. Sehingga dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada, tujuan organisasi akan dapat tercapai secara maksimal. Pandangan yang disampaikan oleh George Terry tersebut dikuatkan oleh Syafiie bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen termasuk pengertiannya dapat menganalisis dari fungsi-fungsi manajemen.

4. Konsep Pelaksanaan

Menurut Syafiie pelaksanaan sudah menjadi barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen. Fungsi pelaksanaan menurut Sukwiaty, dkk dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain Abd Roman menyimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumberdaya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumberdaya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran sevara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa fungsi pelaksanaan secara lebih teknis. Maksudnya pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan beurusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan pencapaian dan usaha-usaha organisasi.

Berkaitan dengan usaha-usaha organisasi dalam mencapai sasarannya jika dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan maka adapun yang menjadi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, khususnya pada Bidang Perindustrian yaitu Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri adalah:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Meyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri kecil menengah;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri kecil menengah;
- d. Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan Intelektual (HaKI) pada Industri kecil menengah;
- e. Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi sesuai sni, *barcode*.
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengawasan Industri;
- i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

Indikator berdasarkan point c,d,e yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya pemantauan secara terus menerus untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Kualitas

Kualitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka lainnya

Seluruh pelaksanaan tugas dievaluasi dengan cara mengukur output tugas melalui dampak dari pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terhadap sasaran yang dituju yaitu para pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan. Output pelaksanaan tugas adalah adanya perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran yaitu pengrajin Batik Bono.

5. Konsep Pembinaan

Istilah pembinaan organisasi menunjukkan kepada sesuatu mengenai organisasi dan cara-cara membinanya, kalau kita ikuti pengertian organisasi menurut Edgar Schein, maka “suatu organisasi merupakan koordinasi aktivitas-aktivitas sejumlah orang yang rasional untk mencapai beberapa tujuan umum yang eksplisit melalui pembagian kerja dan fungsi, dan melalui pula suatu hirarki kewenangan dan pertanggung jawaban”. Organisasi adalah sistem-sistem sosial

yang mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu, demikian dijelaskan oleh Schein. Dan pembinaan organisasi merupakan usaha yang diarahkan untuk kemajuan organisasi atau merupakan sub bagian yang utama dari organisasi.

Menurut Efendi mengatakan pembinaan adalah perbaharuan dan perbaikan melalui pendidikan kepada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan melalui pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Evaluasi
4. Pelaporan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa meununjuk kepada “perbaikan” atas sesuatu, begitu lah pembinaan menurut Miftah Thoha. Dan pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu :

- a. Bimbingan, suatu usaha yang harus dilakukan dalam pembinaan seperti mengarahkan, memberi pedoman dan motivasi.
- b. Pengarahan, adanya upaya yang dilakukan, dengan cara menunjuk teknis, memperbaiki, mendorong agar pembinaan dapat terlaksana dengan baik.
- c. Motivasi dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong, dengan tujuan sebenarnya yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan baik itu secara positif maupun negatif.

- d. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan dibidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, plaket atau pita.

Walaupun masing-masing organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mengembangkan dan membina organisasinya. Akan tetapi menurut Miftah Thoha tujuan umum pembinaan organisasi yang sekiranya dapat meliputi tujuan-tujuan khusus dari masing-masing organisasi antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan diantara para anggota organisasi. Tujuan ini tercermin dari pengertian kolaborasi diatas yang ingin menciptakan saling kepercayaan antara atasan dan atasan, atasan-bawahan, dan antara para bawahan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran berkonfrontasi dengan masalah-masalah organisasi, baik dalam kelompok ataupun diantara anggota-anggota kelompok. Tujuan ini bermaksud bahwa setiap ada masalah dalam organisasi, maka masalah tersebut tidak boleh dibiarkan. Dengan pembinaan organisasi semua masalah akan dapat dipecahkan dan diatasi. Pembinaan organisasi memecahkan masalah secara tuntas, tidak menyapu masalah dalam selimut.
3. Meningkatkan suatu lingkungan “kewenangan dalam tugas” yang didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berarti bahwa setiap tugas dan peranan yang didalamnya elekat kewenangan untuk melakukan tugas dan peran tersebut, hendaknya didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan. Tidak didasarkan atas pilih kasih, dan perasaan suka atau tidak suka. Pengetahuan, akal sehat dan didukung adanya keterampilan-keterampilan tertentu. Bukan didasarkan atas emosi.
4. Untuk meningkatkan tingkat keterbukaan dalam berkomunikasi baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Dengan demikian tujuan ini tidak mengenal kerahasiaan, artinya bahwa aktivitas pembinaan organisasi itu bukanlah misterius dan serba rahasia.
5. Untuk meningkatkan tingkat kesemangatan dan kepuasan orang-orang yang ada didalam organisasi. Semangat kerja yang ada dan kepuasan yang diperoleh semua orang didalam organisasi, melalui pembinaan organisasi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, pembinaan organisasi

lebih berorientasi pada segi personal dibandingkan dengan segi nonpersonal.

6. Untuk mendapat pemecahan yang sinergik terhadap masalah-masalah yang mempunyai frekuensi yang benar. Pemecahan masalah yang sinergik ini dapat diartikan sebagai sejumlah energi dari suatu kelompok yang dapat diartikan sebagai sejumlah energi dari suatu kelompok yang dapat dikendalikan. Cara pemecahan masalah ini, semua pihak menekankan pada kerja sama dibandingkan dengan mengandalkan pada persaingan dalam konflik.
7. Untuk meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pribadi dan kelompok baik didalam pemecahan dan pelaksanaan rencana.

Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni yang menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana dalam suatu organisasi harus didekati dan dilaksanakan jika penyempurnaan merupakan keharusan bagi organisasi tersebut. Keyakinan dasar dari para teorikus dan praktis pembinaan adalah mencapai efektivitas dan kesehatan organisasi. Sehingga dengan demikian perubahan-perubahan dan pembaruan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti, dan anggota-anggota dari suatu sistem tersebut haruslah mampu tumbuh dan bertambah kecakapan, keterampilan dan pengetahuannya.

6. Agen Pemberdayaan

Menurut Chamber individu yang diberdayakan adalah orang yang tidak berdaya yang sering kali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah petugas pembangunan baik formal maupun nonformal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas dilapangan, seperti : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Seksi

Pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Seksi Bimbingan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Petugas non formal adalah individu atau kelompok yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu Lembaga atau secara individu. Petugas non formal tersebut diantaranya : PT. RAPP dalam bentuk program *Comunity Development* (CD) nya.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebut sebagai Agen Pemberdayaan.

7. Industri Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi

menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pengembangan industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah. Pada Dinas fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industri menurut Syahrudin adalah :

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah pengusaha industri kecil.

Dengan adanya sentra industri ini diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi. Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa industri kecil mempunyai investasi modal yang relative kecil, sedangkan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan kerangka pikir berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting yakni sebuah pemahaman dimana yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya atau sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan serta menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

Gambar II.I Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Pemninaan Dinas Koperasi, Saha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono).



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono bahwa hipotesis adalah sebagai dugaan sementara atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris

untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut : *“Diduga Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bano) belum efektif”*.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalah pahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional yang terkait dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya penelitian ini memberi batasan berupa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun konsep operasional penelitian sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya.

3. Manajemen merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tindakan pengawasan, yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumberdaya lainnya.
4. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi. dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
5. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau usaha dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
6. Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan kerja dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
7. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas disini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan tugas pembinaan Industri Batik Bono.
8. Industri Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi daya gunanya.

9. Batik Bono adalah terinspirasi dari gelombang “Bono” yang merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang luar biasa terjadi sekali setahun yang berada di Kecamatan Teluk Meranti di Kabupaten pelalawan yang di lestarikan melalui bentuk batik,kemudian disebut dengan ”Batik Bono”.
10. Pengawasan merupakan upaya pemantauan secara terus menerus untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan.
11. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan.
12. Pengelolaan mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.
13. Kualitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka lainnya.

E. Operasional Variabel

Tabel II.I Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono).

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Penilaian |
|--|---|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pelaksanaan adalah kegiatan penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya . (Abd. Rohman 2018:37) | Pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) | 1. Pengawasan | a. Melakukan kunjungan b. Membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan IKM c. Analisis masalah IKM | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
| | | 2. Pengendalian | a. Pemantauan prestasi Rumah Batik Andalan b. Mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam produksi sebelum menjadi fatal c. Mengatur jadwal pelatihan pengrajin batik | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
| | | 3. Pengelolaan | a. Menentukan strategi pengembangan Industri Batik Bono b. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin c. Mengadakan review secara berkala | Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana |
| | | 4. Kualitas | a. Peningkatan mutu dan daya | Terlaksana |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | saing batik b. Bantuan perlengkapan dan peralatan batik c. HaKI | Cukup terlaksana kurang terlaksana |

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator dalam pelaksanaan tugas pembinaan industri Batik Bono Kabupaten Pelalawan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. Dan sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik pengukuran *Skala Linkert*, yang menurut Sugiyono adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilokasi penelitian. *Skala Linkert* yaitu dengan memberikan nilai skor pada setiap kategori yang menjadi alternatif jawaban terlaksana diberi nilai skor 3, cukup terlaksana skor 2, dan kurang terlaksana skor 1.

Dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan kemudian dicari interval, untuk menentukan interval kriteria penilaian dengan cara nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah setelah itu dibagi dengan jumlah kategori ukuran, selanjutnya hasil pembagian dikurangi 1, rumusnya sebagai berikut :

1. Pengukuran Variabel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = $3 \times 4 \times 21 = 252$

Total Skor Terendah = $1 \times 4 \times 21 = 84$

$$\text{Interval} = \frac{252 - 84 - 1}{3} = 56$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap Variabel dari Pelaksanaan Tugas Pembinaan Industri Batik Bono Kabupaten Pelalawan dengan responden 21 orang dan 12 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 756 dan untuk skor terendah 252 dengan jarak interval 167. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 252-196

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina

Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 195-139

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 138-82

2. Pengukuran Indikator

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = 3 x 3 x 21 = 189

Total Skor Terendah = 1 x 3 x 21 = 63

$$\text{Interval} = \frac{189 - 63 - 1}{3} = 42$$

Untuk mengetahui masing-masing penilaian atas indikator tentang pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono yang terdiri dari 4 indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengawasan, diajukan 3 pertanyaan dengan 21 responden dengan skor pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono tertinggi 189 dan skor terendah 63 dengan interval skor 42 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengawasan berada pada interval nilai skor 189-147.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengawasan berada pada interval nilai skor 146-104.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengawasan berada pada interval nilai skor 103-61.

2. Pengendalian, diajukan 3 pertanyaan dengan 21 responden dengan skor pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono tertinggi 189 dan skor terendah 63 dengan interval skor 42 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengendalian berada pada interval nilai skor 189-147.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengendalian berada pada interval nilai skor 146-104.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator pengendalian berada pada interval nilai skor 103-61.

3. Pengelolaan, diajukan 3 pertanyaan dengan 21 responden dengan skor pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono tertinggi 189 dan skor terendah 63 dengan interval skor 42 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengelolaan berada pada interval nilai skor 189-147.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator Pengelolaan berada pada interval nilai skor 146-104.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator pengelolaan berada pada interval nilai skor 103-61.

4. Kualitas, diajukan 3 pertanyaan dengan 21 responden dengan skor pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono tertinggi 189 dan skor terendah 63 dengan interval skor 42 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada

sub indikator kualitas berada pada interval nilai skor 189-147.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator kualitas berada pada interval nilai skor 146-104.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai pelaksanaan tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina Industri Batik Bono pada sub indikator kualitas berada pada interval nilai skor 103-61.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Kemudian untuk metode penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Karena dalam penelitian kuantitatif masalah yang dibawa oleh penulis harus sudah jelas dan mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur menurut Sugiyono.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Batik Andalan yang merupakan pusat tempat para pengrajin Batik Bono yang dibina dan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian yakni yang melakukan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah ialah Dinas terkait pembinaan dilakukan agar konsistensi dari salah satu bentuk kebudayaan Pelalawan tetap terjaga, selain itu berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat dan mengamati bahwasannya masih ditemukannya gejala-gejala yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan Industri Kecil Menengah pada industri batik Bono.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei keberadaan populasi dan sampel nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian. Demi mencapai keakuratan validitas data yang dihasilkan populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi ukuran maupun karakteristiknya. Apabila seseorang ingin melakukan penelitian semua elemen adalah wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi adalah subjek suatu penelitian yang memiliki karakteristik yang homogen menurut Sugiyono. Dalam arti lain adalah sekelompok orang atau perkumpulan orang yang mempunyai karakteristikpersamaan dalam sebuah organisasi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan bidang perindustrian.

Sampel itu sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Diskoperindag, Kepala Bidang Perindustrian, Seksi Bimbingan dan Pengawasan IKM serta pengrajin batik Bono yang berada di Rrumah Batik Andalan.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1 :Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono).

| No | Unit Sampel | Populasi | Sampel | Total |
|----------|---|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kepala Bidang Perindustrian | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kepala Seksi Bimbingan Dan Pemngawasan Industri | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri | 7 | 7 | 100% |
| 5 | Pengrajin Batik Bono RBA | 11 | 11 | 100% |
| | Jumlah | 21 | 21 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk bidang Perindustrian yakni menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah seluruh populasi dijadikan sampel dengan alasan jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau serta mengetahui tentang pelaksanaan tugas pembinaan Industri Kecil Menengah.

Dan untuk pengrajin batik Bono menggunakan teknik sensus, teknik sensus adalah teknik penarikan sampel yang semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dikarenakan populasi relatif kecil.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Data primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari reponden melalui penelitian lapangan tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono). Dalam penelitian ini data diperoleh dari penyebaran kuisioner sebanyak 21 responden yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Seksi Bimbingan Dan Pengawasan, Pegawai Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri, serta pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan (RBA).

2. *Data sekunder* adalah data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan dapat menunjang objek penelitian ini meliputi buku-buku kepustakaan, arsip-arsip, serta peraturan yang menyangkut dengan Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono). Sumber data yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Rumah Batik Andalan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yakni metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung tentang perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu

memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, menurut Sugiyono.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Data yang digunakan dalam teknik wawancara ini meliputi: nama, umur, tingkat pendidikan, dan jabatan dalam pelaksanaan tugas pembinaan industri batik Bono Kabupaten Pelalawan. Teknik ini dimaksud agar peneliti mampu mengeksplorasi data responden yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Pelalawan dan kepada Ketua Pengrajin Batik Bono.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pertanyaan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. Responden tersebut 21 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Seksi Bimbingan Dan Pengawasan Industri, Pegawai Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri, serta pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan (RBA).

4. Dokumentasi

Merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat/dokumen-dokumen yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sehingga proses ini diartikan sebagai proses dimana adanya upaya mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan data, membuat induksi maupun penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan. Selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan di klasifikasikan melalui kuisisioner menurut jenisnya kemudian diolah kedalam tabel setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan yang mudah untuk dipahami.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, tahun 2016 – 2021 yaitu:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan bidang koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurung waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih.

Yang menjadi visi Kabupaten Pelalawan adalah **“INOVASI MENUJU PELALAWAN EMAS (EKONOMI MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)”**.

Misi Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
3. Meningkatkan Penguatan Sistem inovasi untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur ;
5. Meningkatkan Kinerja Birokasi dan Otonomi Desa;
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang berkelanjutan;
7. Meciptakan Ketertiban dan Keamanan.

Dari 7 misi Kabupaten Pelalawan tersebut, terdapat 2 (dua) misi yang secara umum berkaitan dengan pelayanan publik dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan, dan 1 (satu) misi yang langsung berkaitan

dengan teknis tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.

Meningkatkan pelayanan terkait peningkatan modal usaha serta menciptakan wirausaha baru sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan dapat menekan pengangguran serta menciptakan lapangan kerja.

2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.

Meciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, transparan dan taat kepada hukum.

Dengan adanya visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pelalawan serta adanya keputusan dari Menpan tentang adanya nilai nilai dan data yang dikelompokkan oleh Menpan maka pada tahun 2016 resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan melebur menjadi satu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Sebagai Perangkat Daerah bertipe A dengan beban kerja yang besar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Pelalawan didukung dengan 51 (lima puluh satu) orang sumber daya Aparatur Sipil Negara. Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mempekerjakan 19 (sembilan belas) orang Tenaga Harian Lepas yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang tenaga administrasi, 13 (tiga belas) orang petugas kebersihan dan 10 (sepuluh) orang petugas keamanan, 3 (tiga) Tenaga Penyuluh Lapangan.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia dalam menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan berjumlah 108 (seratus delapan) orang. Adapun komposisi sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1: Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016.

| NO. | SUMBER DAYA MANUSIA | JUMLAH (Org) | % |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | ASN DISKOPUKMPERINDAG | 51 | 47,22 |
| 2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 57 | 52,78 |
| Jumlah | | 108 | 100,00 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Dilihat dari pengelompokan Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan, sebagaimana ditunjukkan Tabel IV.2 pada tahun 2016 sebagian besar berada pada Golongan III dengan rasio mencapai 61% (31 orang), dan diikuti oleh Golongan IV 13,72% (7 orang). Selebihnya berada pada Golongan II 25% (13 orang).

Tabel IV.2: Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan Tahun 2016.

| NO. | PENUGASAN | GOLONGAN | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | | I | % | II | % | III | % | IV | % |
| 1 | ASN DISKOPUKMPERINDAG | 0 | 0,00 | 13 | 25,00 | 31 | 61,00 | 7 | 13,72 |
| 2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 0 | 0,00 | 13 | 25,00 | 31 | 61,00 | 7 | 13,72 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Kapasitas dan kapabilitas aparatur dipengaruhi dan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3, didominasi pada tingkat pendidikan Strata-1 dengan rasio mencapai 58,82% (30 orang) dan SLTA Sederajat dengan rasio 25,49% (13 orang).

Tabel IV.3: Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016.

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (Org) | % |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Sarjana Strata II (S-2) | 6 | 11,7 |
| 2 | Sarjana Starata I (S-1) | 30 | 58,85 |
| 3 | Diploma (D-3) | 2 | 3,9 |
| 4 | SLTA sederajat | 13 | 25,56 |
| Jumlah | | 51 | 100,00 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Tabel IV.4: Kondisi Existing Sumber Daya PTT Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016.

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (Org) | % |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Sarjana Starata I (S-1) | 15 | 24,59 |
| 2 | Diploma (D-3) | 3 | 4,91 |
| 3 | SLTA sederajat | 39 | 70,50 |
| Jumlah | | 57 | 100,00 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Secara umum jika ditinjau dari golongan, tingkat pendidikan formal dan struktur umur sebagaimana ditunjukkan pada data sebelumnya, kondisi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup baik untuk menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Namun, jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan terhadap kebutuhan SDM Kabupaten Pelalawan, maka kondisi saat ini belum memenuhi jumlah dan komposisi ideal yang dibutuhkan.

Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dengan type A yang disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 seharusnya terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) orang pada Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Untuk menyikapi adanya kesenjangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik IV.4 perlu dilakukan upaya penyesuaian dan diarahkan menuju kondisi yang menjadi arahan dari hasil analisis tersebut. Adapun jumlah kebutuhan SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun mendatang disajikan pada tabel IV.5 berikut.

Tabel IV.5: Kebutuhan SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

| JUMLAH PEGAWAI | | | | |
|----------------|------|------|------|------|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 50 | 58 | 75 | 90 | 99 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Bentuk Program Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perindustrian dan Perdagangan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
10. Program Penataan Struktur Industri
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah dan peran koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pelalawan, *melalui strategi* :
 - a. Pengembangan dan pembinaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.
 - b. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Hilir yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
 - e. Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan.
 - f. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan dan Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga.

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di

Kabupaten Pelalawan *melalui strategi* :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

3. Peningkatan daya saing produk koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pelalawan, *melalui strategi* :

- a. Meningkatkan kemampuan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi produk Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk IKM.
- d. Meningkatkan Kualitas Agro Industri.

4. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan *melalui strategi* :

- a. Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
- b. Memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan *melalui strategi* :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
- b. Menyediakan kebijakan-kebijakan daerah yang lebih berpihak pada koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagai wadah kolektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif.
2. Meningkatkan permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan melalui bantuan Permodalan.
3. Meningkatkan Pengetahuan Pengelola Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dan Pemasaran Produk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
4. Meningkatkan peluang dan kesempatan pada Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mengali dan mengembangkan potensi ekonomi.
5. Menyusun strategi program pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
6. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pengurus/Pengelola Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

C. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan merupakan Perangkat Daerah dengan type A melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil Pemerintah dalam rangka Tugas Pembantuan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan merupakan Unit Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten serta penilaian atas hasil pelaksanaannya.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Kepala

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu.
- 3) Perumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
- 4) Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas.
- 5) Perumusan Kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Dinas.

- 6) Perumusan Kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 7) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
- 8) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai.
- 9) Perumusan Kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
- 10) Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- 11) Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- 12) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
- 13) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- 14) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 15) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 16) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Program

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Menyusun rincian kerja sub bagian program dan keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha.
- 4) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas.
- 5) Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja dinas.
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas.
- 7) Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan menunjang pelaksanaan tugas.
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja di lingkungan dinas.

- 9) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (lakip), laporan tahunan, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd).
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) dinas.
- 11) Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- 12) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dinas.
- 13) Menyelenggarakan administrasi pembukuan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- 14) Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai.
- 15) Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai.
- 16) Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 17) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 18) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 19) Melaksanakan tugas lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.;
- 20) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 21) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 22) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Program dan Keuangan.
- 23) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain dan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 5) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Keuangan.
- 5) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Perumusan Rencana dan Program Operasional pembinaan Pengembangan SDM Koperasi Usaha dan Kelembagaan Koperasi.
- 2) Penyusunan Pedoman Penyuluhan tentang kebijakan peraturan dan ketentuan dalam Pemberian Akta Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Koperasi.
- 3) Penjabaran Juknis Pembinaan SDM Koperasi, Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SDM Koperasi, Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.
- 5) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya dan instansi sektoral yang terkait dalam rangka Pembinaan Koperasi.
- 6) Pelaksanaan Evaluasi hasil penelaahan tentang peningkatan SDM Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.

- 7) Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan SDM Koperasi, Pengembangan Usaha, dan Kelembagaan Koperasi.
- 8) Penghimpunan Rencana kerja seksi pengembangan SDM, seksi Pengembangan usaha koperasi dan seksi kelembagaan.
- 9) Pelaksanaan Rapat dan pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan Tugas untuk pemberdayaan koperasi di seksi pengembangan SDM koperasi.
- 10) Penghimpunan Data/informasi pengembangan Koperasi.
- 11) Pelaksanaan evaluasi atas perkembangan Koperasi.
- 12) Pemberian data/informasi yang dibutuhkan Kepala Dinas di bidang Pengembangan Koperasi.
- 13) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 14) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang sesuai dengan bidang.

Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Merencanakan program kegiatan tahunan berdasarkan tugas fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menghimpun dan menginventarisasi serta mengevaluasi dan memverifikasi pendirian koperasi perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi serta pembukaan kantor cabang dan proses perizinan usaha koperasi.
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan pada bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan terhadap pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- 5) Melaksanakan koordinasi pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- 6) Melaksanakan penilaian koperasi berprestasi.
- 7) Melakukan verifikasi dan pengusulan nomor Induk koperasi (nik) ke kementerian koperasi dan ukm.
- 8) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi secara rutin maupun berkala.
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.

- 10) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi fasilitasi pembiayaan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan ksp dan usp koperasi.
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur bantuan modal kepada usp dan usp.
- 5) Melaksanakan pemberian rekomendasi permodalan kepada ksp dan usp.
- 6) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi fasilitasi pembiayaan koperasi yang dibutuhkan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi

Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi berdasarkan rencana kerja

dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- 2) Menghimpun dan menginventerisasi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur dan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi kepada gerakan koperasi.
- 5) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta melakukan tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi dan mengatur pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dan pengawasan tentang peraturan dan kebijakan perkoperasian kepada gerakankoperasi.
- 6) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi yang dibutuhkan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan Perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik melalui kemitraan usaha.
- 2) Penyiapan rencana program perumusan, penjabaran kebijakan teknik fasilitasi pembiayaan dan bimbingan kepada pengembangan usaha mikro, kecil, menengah.
- 3) Penyiapan rencana program dan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, serta pemberian dukungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah.
- 4) Penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam penyuluhan, pelatihan bagi usaha mikro, kecil, menengah.
- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang usaha mikro, kecil, menengah.
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan di Bidang usaha mikro, kecil, menengah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan UMKM, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah;
- 8) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan UMKM, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana UMKM.
- 9) Melayani usaha mikro, Kecil, menengah sesuai Kebutuhan dan Pengembangan UMKM.
- 10) Melaksanakan Pembinaan ketrampilan UMKM dalam pengembangan dalam meningkatkan mutu hasil produksi.
- 11) Mempromosikan Produk Unggulan Usaha Kecil pada event Nasional, Regional dan Daerah.
- 12) Mendata Usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kebutuhan dan Pengembangan Usahanya.
- 13) Memfasilitasi Label Halal dan higienis dan Kadaluarsa Produk UMKM.
- 14) Melaksanakan temu usaha antar UMKM.
- 15) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang sesuai dengan bidang.

Bidang UMKM terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM

Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah.
- 3) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala.
- 4) Mendata usaha mikro kecil dan menengah secara kuantitas dan jenis usaha.
- 5) Melayani usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebutuhan dan pengembangan usaha UMKM.
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi manajemen bagi UMKM dan membuat proposal sederhana.
- 7) Melaksanakan pembinaan ketrampilan UMKM dalam pengembangan usaha dan meningkatkan mutu hasil produksi.
- 8) Memfasilitasi label halal higienis dan kadaluarsa produk UMKM.
- 9) Mempromosikan produk unggulan usaha kecil pada even nasional, regional dan daerah.
- 10) Melaksanakan temu usaha antar UMKM.
- 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM.
- 14) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM

Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi serta pengumpulan dan

pegelolaan data usaha dan kemitraan umkm, penjabaran dan kerja sama usaha kemitraan umkm.

- 3) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi usaha dan kemitraan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala.
- 4) Mendata sumber-sumber fasilitas yang berasal dari Pemerintah dan Pihak ke tiga.
- 5) Melayani UMKM sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- 6) Membuat pedoman Fasilitas UMKM yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pelalawan.
- 7) Melaksanakan temu usaha /pertemuan antara calon Lembaga /Badan /usahawan untuk memfasilitasi dengan calon UMKM penerima fasilitas.
- 8) Memfasilitasi ikatan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga/Badan/Usahawan untuk memfasilitasi dengan calon UMKM penerima fasilitas.
- 9) Mendata Lembaga/Badan /Usahawan dan UMKM yang telah memfasilitasi dan menerima fasilitas.
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 11) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM.
- 13) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Sarana Prasarana UMKM.

Seksi Sarana Prasarana UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Sarana Prasarana UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventarisasi. serta pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses produksi, distribusi dan promosi serta pemasaran produk umkm serta kelengkapan sarana dan prasarana UMKM.
- 3) Mengidentifikasi sarana dan prasarana UMKM.
- 4) Melaksanakan magang bagi UMKM pada pihak ke tiga.
- 5) Monitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana UMKM.
- 6) Memfasilitasi pencarian pangsa pasar produk UMKM.
- 7) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana umkm secara rutin maupun berkala.

- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana UMKM.
- 11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan pembangunan industri, penerbitan perizinan, melengkapi data sistem informasi industri nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penetapan dan penyusunan rencana pengembangan industri daerah.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja bidang industri.
- 3) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah.
- 4) Penerbitan dan Pembinaan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah.
- 5) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten.
- 6) Sistematis penyampaian pelaporan informasi industri.
- 7) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri.
- 8) Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil pertanian.
- 9) Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah.
- 10) Memberikan rekomendasi permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Industri Kecil Menengah.
- 11) Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi industri sesuai SNI, Barcode, Halal dan Tanggal Kadaluarsa (Expired date).
- 12) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

a. Seksi Industri Agro dan Kimia

Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Industri Agro dan Kimia berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan industri agro dan kimia.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri agro dan kimia.
- 4) Menyusun dan menetapkan bidang usaha industri agro dan kimia prioritas daerah.
- 5) Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan.
- 6) Melaksanakan pengembangan teknologi inovasi industri agro dan kimia.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Industri Agro dan Kimia.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Industri

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan usaha industri.
- 3) Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sarana prasarana industri.
- 4) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pengembangan usaha industri.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri.
- 6) Melaksanakan pengembangan sentra dan kluster usaha industri daerah.

- 7) Merumuskan dan melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha industri.
- 8) Melaksanakan konsultasi pembinaan dan pengembangan usaha industri.
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Usaha Industri.
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Meyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri kecil menengah.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri kecil menengah.
- 4) Monitoring dan evaluasi data jumlah dan jenis usaha Industri kecil menengah.
- 5) Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan Intelektual (hki) pada Industri kecil menengah.
- 6) Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi incklstri sesuai sni, *barcode*, halal dan tanggal kadaluarsa.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan.
- 2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- 3) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
- 4) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), untuk penerimaan waralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya.
- 5) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya.
- 6) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- 7) Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar.
- 8) Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- 9) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor.
- 10) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 11) Penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana Perdagangan.
- 12) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang Perdagangan.
- 13) Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor.
- 14) Pelaksanaan Pembagian tugas, arahan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 15) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi

Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan program di bidang sektoral pengembangan perdagangan, pemasaran, promosi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.
- 3) Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya terkait dukungan dan bantuan kerjasama dalam peningkatan perdagangan ekspor dan impor.
- 4) Melakukan pendataan dan pelaporan ekspor dan impor.
- 5) Menerbitkan dan membina perizinan di bidang perdagangan.
- 6) Melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan operasi pasar.
- 7) Melaksanakan pemantauan, pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi.
- 11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Kemetrollogian dan Tata Niaga

Seksi Kemetrollogian dan Tata Niaga mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Kemetrollogian dan Tata Niaga berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (uttp) yang berada di masyarakat.
- 3) Melaksanakan penyidikan dibidang metrologi legal.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol.
- 5) Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan.
- 6) Mengawasi pupuk bersubsidi, pestisida dan barang bersubsidi lainnya.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.

- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

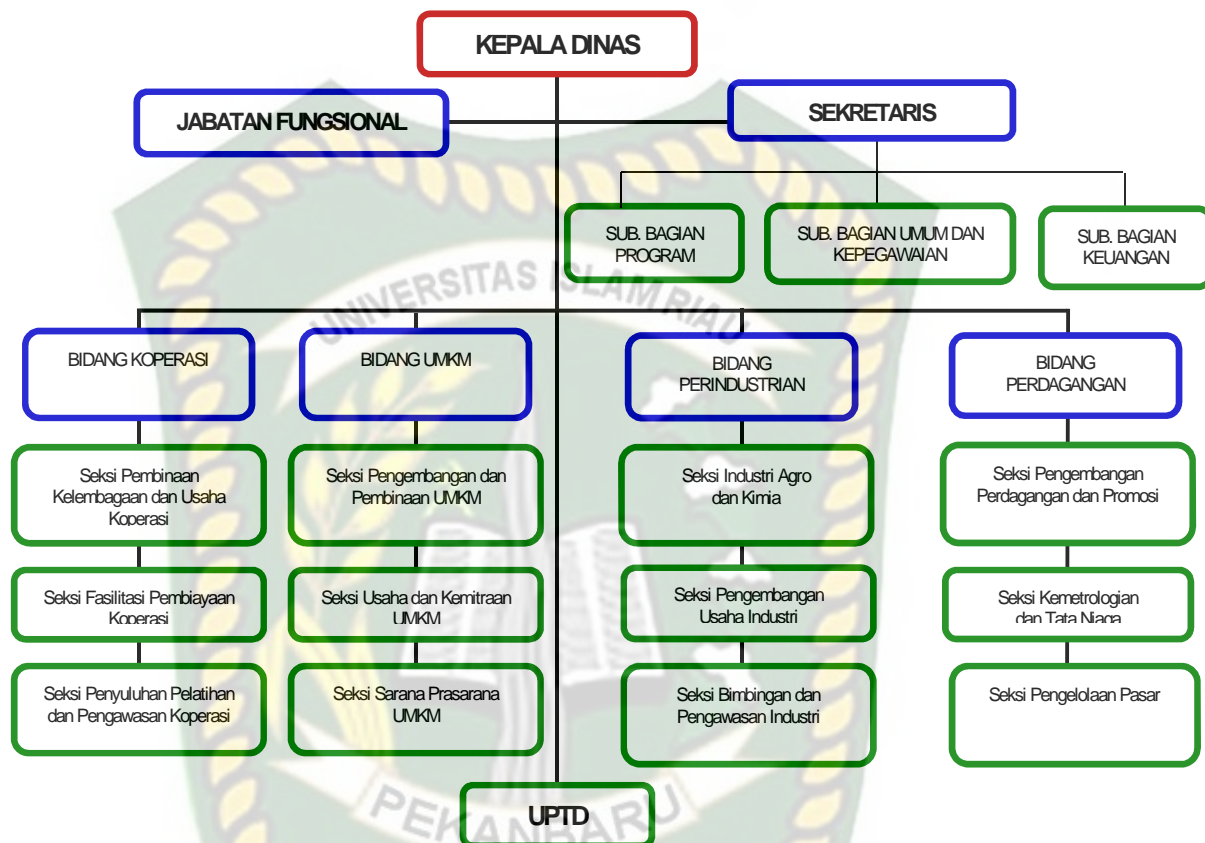
- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolaan pasar.
- 3) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar.
- 4) Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar.
- 5) Melaksanakan pemantauan dan penilaian pasar.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- 7) Melaksanakan pemantauan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- 8) Melakukan pendataan pasar dan pembinaan pengelola pasar.
- 9) Melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
- 10) Melaksanakan pemetaan pertumbuhan dan pengembangan pasar.
- 11) Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia tenaga retribusi pasar dan pengelola pasar.
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 13) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengelolaan Pasar.
- 15) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan, 2019

F. Sejarah Ringkas Rumah Batik Andalan

Rumah Batik Andalan (RBA) terletak di pusat Kabupaten Pelalawan yaitu di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Usaha kerajinan batik di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan kelompok usaha, dimana terdapat 2 pusat usaha kerajinan Batik Bono yang terletak di lingkungan pabrik RAPP tepatnya pada Balai Pelatihan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Perumahan Townset 2 dan di Gang.2000 dibelakang Pasarbaru. Dengan motif atau corak yang identik dengan simbol-simbol budaya Provinsi Riau Khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Rumah Batik Andalan (RBA) ini merupakan program *Community Development* (CD) dari Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, PT. RAPP mulai melakukan upaya untuk memberdayakan perempuan lokal dengan memberikan mereka keterampilan baru dan membantu mereka untuk mendapatkan uang mereka sendiri.

Dimulai dengan program pelatihan batik Bono tahun 2013. Usaha program pelatihan batik Bono didukung sekitar 60 pengrajin batik. Dimana setiap perajin batik harus menguasai mencating, menggambar, mewarnai, serta memiliki kreatifitas. Dan dilakukan pendampingan dimulai dari pengenalan alat hingga teknik membatik.

Sebagai komitmen PT. RAPP dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kerja yang diwujudkan dengan mendorong pemberdayaan kemandirian masyarakat yang dimulai dengan program pelatihan Batik Bono. Hingga akhirnya terbentuk kelompok usaha batik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tahun 2013. Bentuk komitmen lainnya PT. RAPP tersebut, selain memfasilitasi pelatihan PT.RAPP juga memberikan sumbangan Rumah Batik Andalan tahun 2013 yang diresmikan PT. RAPP bersama ketua Bhayangkari Riau Santi Condro Kirono dan didampingi oleh ketua TP PKK Pelalawan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Rumah Batik Andalan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono), dimana dalam pembahasan bab ini peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada sesuai dengan indikator variabel penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) terlebih dahulu kita melihat responden penelitian.

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) dengan demikian untuk memenuhi data yang akan dianalisa sebagai bahan informasi Pelaksanaan Tugas Pembinaan kepada Industri Batik Bono tersebut maka perlu mencari data yang akurat dari responden yang mengetahui tentang pelaksanaan tugas pembinaan tersebut sehingga peneliti membagi kriteria responden sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya serta dalam mengisi angket atau kuisioner yang peneliti berikan, untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

| No | Kelompok Responden | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Dinas Koperasi, UKM, Perindag | 8 | 2 | 10 |
| 2 | Pengrajin Rumah Batik Andalan | 1 | 10 | 11 |
| Jumlah | | 9 | 12 | 21 |
| Presentase | | 43% | 57% | 100% |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019.

Dari tabel V.1 diatas diterangkan bahwa untuk Ditribusi jumlah responden Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang dengan persentase 43% sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 oranag dengan persentase 57%.

2. Usia Responden

Berdasarkan hasil kuisioner tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Pelalawan (Studi Industri Batik Bono). Yang telah disebarakan kepada seluruh Responden Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan serta Pengrajin Rumah Batik Andalan.

Usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada semua orang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, selain itu usia juga berpengaruh pada produktivitas kerja. Berdasarkan angket ataupun kuisioner yang disebarakan kepada responden maka diketahui bahwa responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

| No | Usia | Kelompok Responden | | Jumlah | Prsentase |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|
| | | Dinas Koperasi, UKM, Perindag | Pengrajin RBA | | |
| 1 | 21-30 Tahun | 1 Orang | 7 Orang | 8 | 38% |
| 2 | 31-40 Tahun | 2 Orang | 2 Orang | 4 | 19% |
| 3 | 41-50 Tahun | 4 Orang | 2 Orang | 6 | 29% |
| 4 | > 50 | 3 Orang | - | 3 | 14% |
| Jumlah | | 10 Orang | 11 Orang | 21 | 100% |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa ada 1 orang pegawai atau pelaksana kegiatan pembinaan yang berada pada rentang usia 21-30 tahun dan ada sekitar 7 orang pengrajin RBA yang menerima pembinaan juga berada pada rentang usia 21-30 tahun, sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada pada rentang usia 21-30 tahun adalah 8 orang sekitar 38% dari jumlah responden secara keseluruhan.

Selanjutnya pada rentang usia 31-40 tahun ada sekitar 2 orang pegawai pelaksana pembinaan Industri Kecil Menengah, dan pengrajin RBA yang berusia

31-40 tahun juga berjumlah 2 orang. Sehingga jumlah keseluruhan responden pada rentang usia 31-40 tahun adalah 4 orang dengan presentase 19% dari keseluruhan responden.

Kemudian pada rentang usia 41-50 tahun ada 4 orang responden dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan untuk Pengrajin RBA dengan 2 orang. Sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada pada rentang usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 29%. Dan terakhir ada 3 orang dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag yang berada pada rentang usia > 50 tahun dengan presentase 14%.

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan seseorang aka semakin matang pola fikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah laku setiap orang. Dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden, semakin tinggi pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disajikan peneliti dalam kuisisioner penelitian yang telah dilaakkan, dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelawawan (Studi Indsutri Batik Bono). Maka dapat diketahui bahwa

tingkatan pendidikan responden yang masuk ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

| No | Pendidikan | Kelompok Responden | | Jumlah | Presentase |
|--------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|------------|
| | | Dinas Koperasi, UKM, Perindag | Pengrajin RBA | | |
| 1 | SD/Sederajat | - | 3 | 3 | 14 % |
| 2 | SMP/Sederajat | - | - | - | - |
| 3 | SMA/Sederajat | 1 | 7 | 8 | 38 % |
| 4 | D3 | 1 | - | 1 | 5 % |
| 5 | S1 | 6 | 1 | 7 | 33 % |
| 6 | S2 | 2 | - | 2 | 10 % |
| Jumlah | | 10 | 11 | 21 | 100 % |

Sumber : Olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa ada 3 orang Pengrajin RBA dengan presentase 14% berpendidikan SD/Sederajat. Kemudian pada SMA/Sederajat ada 1 orang dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan 7 orang dari Pengrajin RBA sehingga jumlah keseluruhan responden pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu 8 orang dengan presentase 38%. Selanjutnya pada tingkat D3 ada 1 orang dari Dinas, UKM, Perindag dengan presentase 5%. Pada tingkat S1 untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindag ada 6 orang dan untuk Pengrajin RBA ada 1 orang maka jumlah keseluruhan untuk responden pada tingkat pendidikan S1 berjumlah 7 orang dengan presentase 33%. Dan terakhir pada tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag dengan presentase 10%.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan tinggi hingga terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan

dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik. Oleh karena itu diharapkan para pegawai dapat bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugasnya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono).

Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) yang dimaksud dalam penelitian ini yakni dilihat dari beberapa indikator penelitian yang sesuai rencana penelitian dalam peta pemikiran penelitian, selanjutnya dibahas sebagai berikut :

1. Pengawasan

Seksi Bimbingan dan pengawasan industri berperan sebagai pemantau atau pengawas, artinya tugas Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri meliputi operasi internal untuk menilai keberhasilan kinerja. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri juga harus membaca masalah dan peluang yang mungkin timbul sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, dalam kapasitas ini harus disimpan dan dipelihara sebaik-baiknya, karena informasi merupakan data yang sangat berharga untuk meningkatkan daya saing Industri Batik Bono. Dengan demikian Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri harus memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan informasi seperti membaca berita, laporan, serta menjaga kontak relasi dengan RBA Abd. Rohman (2018:52). Pengawasan selalu diartikan

sebagai keseluruhan upaya organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi serta personil dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang memanfaatkan sejumlah fasilitas dan sumberdaya lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

Berikut tanggapan dari 21 responden yang mengisi angket atau kuisisioner mengenai Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan.

| No | Item Pertanyaan | Jawaban Responden | | | Total |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Melakukan Kunjungan ke RBA | 5 | 16 | - | 21 |
| 2 | Membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan IKM | - | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Analisis masalah IKM | - | 8 | 13 | 21 |
| Jumlah | | 5 | 35 | 23 | 63 |
| Skor | | 15 | 70 | 23 | 108 |
| Kategori | | Cukup Terlaksa | | | |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.4 dapat dijelaskan bahwa klasifikasi tanggapan responden terhadap indikator pengawasan pada penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai bagaimana pelaksanaan kunjungan ke Rumah Batik Andalan (RBA) yakni pada kategori Terlaksana menunjukkan jumlah

responden tersebut sebanyak 5 orang yang menyatakan terlaksana, dengan alasan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan memang sering berkunjung ke Rumah Batik Andalan. Jawaban responden yang menyatakan Cukup Terlaksana sebanyak 16 orang. Dengan alasan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan hanya berkunjung dan tapi mereka tidak pernah membina.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan IKM yaitu Industri Batik Bono dapat kita lihat bahwa 11 responden yang menyatakan Cukup Terlaksana, dengan alasan kegiatan kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan kegiatan membanding serta menilai waktu, dan hasil kegiatan Rumah Batik Andalan sebagai pusat Industri Batik Bono. Dan jawaban untuk Kurang Terlaksana berjumlah 10 responden, dengan alasan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan Hanya berkunjung tanpa melaksanakan kegiatannya yaitu pengawasan.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai analisis masalah IKM dapat kita lihat bahwa 8 responden menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan dapat dilihat dari hasil kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan yang sering mengunjungi RBA. Dan 13 responden yang menyatakan Kurang terlaksana, dengan alasan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan tidak pernah melakukan kunjungan ke RBA dalam rangka analisis masalah Industri Batik Bono, Kunjungan yang dilakukan hanya untuk meminjam Kain Batik Bono, bukan dalam rangka menganalisis Permasalahan yang

sedang dihadapi Industri Batik Bono. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator pengawasan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni dengan berada pada rentang skor **108** yang berada pada kategori **Cukup terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya pengawasan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal seperti adanya membandingkan serta menilai rencana dan hasil kegiatan Industri Btaik Bono serta menganalisis masalah Industri Batik Bono.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengawasan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari seringnya kunjungan yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri ke Rumah Batik Andalan.

“Dalam kunjungan yang kami laksanakan ke Rumah Batik Andalan, sudah cukup sering ya, kami melakukan kunjungan untuk melihat kegiatan para pembatik disana serta mengawasi kegiatan pembatik tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan Rumah Batik Andalan serta perkembangan para pembatik itu sendiri dalam menjalankan usahanya sebagai Industri, yang mana produknya sudah menjadi produk unggulan di daerah kita ya” (Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, untuk kunjungan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri. Dan mengenai kegiatan membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan Industri Batik Bono dapat kita lihat bahwa Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri belum berjalan.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak terlaksana dengan baik sebab

“Untuk kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas, itu memang sering datang kemari, tapi yang namanya membina, mengawasi, membandingkan kegiatan kami dengan hasil dan rencana, apalagi dalam menganalisis masalah Industri kami, itu belum ada kami rasakan. Kunjungan yang dilakukan oleh Dinas ya hanya berkunjung, dan kadang mereka membawa kain batik kami untuk dipinjam. Biasanya untuk dibawa pameran atau perlombaan. Dinas biasanya begitu” (Siti Nurbaya, 20 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan ibu Siti Nurbaya dapat dipahami bahwa kunjungan yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri ke Rumah Batik Andalan bukan dalam rangka melaksanakan pembinaan dalam peningkatan kemampuan para pengrajin melainkan pembinaan dalam bentuk promosi, dengan pernyataan ibu Siti Nurbaya yang mengatakan bahwa kadang Dinas meminjam kain batik mereka untuk dibawa pameran dan perlombaan.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan serta kesimpulan peneliti untuk indikator pengawasan disini peneliti melihat masih cukup telaksana, karena pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya sekedar berkunjung ke Rumah Batik Andalan. Tetapi untuk kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana dengan baik. Dan dari hasil kunjungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sudah melaksanakan pembinaan yaitu dibidang promosi.

2. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Pengendalian berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas dilapangan sesuai dengan yang direncanakan Abd. Rohman (2018:39).

Berikut tanggapan dari 21 responden yang mengisi angket atau kuisisioner mengenai Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengendalian Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan.

| No | Item Pertanyaan | Jawaban Responden | | | Total |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Pemantauan prestasi Rumah Batik Andalan | 1 | 10 | 10 | 21 |
| 2 | Mendeteksi Kesalahan-Kesalahan Dalam Produksi Sebelum Menjadi Fatal. | - | 5 | 16 | 21 |
| 3 | Mengatur jadwal pelatihan pengrajin batik | - | 6 | 15 | 21 |
| Jumlah | | 1 | 21 | 41 | 36 |
| Skor | | 3 | 42 | 41 | 86 |
| Kategori | | Kurang Terlaksana | | | |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.5 diatas tentang tanggapan responden terhadap indikator pengendalian pada penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) diketahui bahwa pada item

pertanyaan 1 tentang pemantauan prestasi Rumah Batik Andalan (RBA) responden yang menjawab terlaksana berjumlah 1 orang, dengan alasan bahwa selaku pelaksana Pembinaan Industri Batik Bono sudah seharusnya melakukan pengendalian terhadap Rumah Batik Andalan (RBA) khususnya dalam pemantauan prestasi yang telah diukir oleh Industri Batik Bono. Yang menjawab pada kategori cukup terlaksana berjumlah 10 responden, dengan alasan sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pemantauan prestasi Rumah Btaik Andalan (RBA). Dan yang menjawab Kurang terlaksana berjumlah 10 responden, dengan alasan para perajin belum mengetahui pemantauan prestasi seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada Industri Batik Bono.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Mendeteksi Kesalahan-Kesalahan Dalam Produksi Sebelum Menjadi Fatal yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 5 orang yang artinya sudah terlaksana, namun belum maksimal dengan adanya pendeteksian kesalahan-kesalahan dalam produksi Batik Bono. Dan yang menjawab kurang terlaksananya pendeteksian Kesalahan-Kesalahan Dalam Produksi Batik Bono Sebelum Menjadi Fatal berjumlah 16 responden. Dengan alasan, memang tidak pernah melakukan pendeteksian Kesalahan-Kesalahan Dalam Produksi Sebelum Menjadi Fatal kepada Industri Batik Bono.

Untuk item Pertanyaan 3 mengenai pengaturan jadwal pelatihan pengrajin Batik Bono yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 6 responden yang artinya sudah terlaksana, namun belum maksimal atau rutin. Dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 15 responden, yang artinya belum terlaksananya dengan baik

adanya pengaturan jadwal pelatihan kepada pengrajin Batik Bono. Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor **86** yang berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya pengawasan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengendalian yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari pemantauan prestasi Rumah Batik Andalan yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri ke Rumah Batik Andalan.

“pemantauan prestasi yang kami laksanakan kepada Industri Batik Bono, sudah kami laksanakan, kami melakukan pemantauan prestasi Industri Batik Bono ya karna kan Batik Bono sudah menjadi produk unggulan kita ya, sudah kita bawa kemana-mana untuk dipamerkan, lalu kami melakukan pelatihan untuk meningkatkan finishingnya yaa, dalam motif Bono, kemudian ikut perlombaan Hatikatria. yaitu jadi itu harus dipertahankan. Agar prestasi dari Industri Batik Bono ini terus terjaga konsistensinya baik dimasyarakat kita maupun diluar daerah kita...”(Deddy Kurnyawan, 20 Maret 2019)

Dari pernyataan tadi, dapat diketahui bahwa untuk pemantauan prestasi Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri sudah dilaksanakan dan Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri memberikan pelatihan dalam proses akhir membatik Bono, agar Motif yang dihasilkan menjadi lebih rapi.

“...Namun untuk 2 hal yang tadi belum kami laksanakan dengan baik. untuk penjadwalan pelatihan untuk pembatik sudah kami lakukan, saat itu kami menjadwalkan beberapa pembatik untuk melihat teknik membatik secara langsung, waktu itu pada tahun 2015 kami ajak beberapa pembatik untuk

kejogja ya melihat proses membatik yang sebenarnya secara langsung” (Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019)

Kemudian, Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mengatakan bahwa Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri belum melakukan pendeteksian kesalahan-kesalahan dalam produksi Industri Batik Bono, dalam penjadwalan pelatihan kepada pembatik di Rumah Batik Andalan hanya sekali dilakukan, yaitu pada tahun 2015.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana namun belum terlaksana dengan baik sebab

“Untuk pemantauan prestasi kami ya ada lah mereka lakukan beberapa kali, dengan memastikan bahwa kami tetap mendapatkan orderan kain batik, untuk pelatihan ada pernah sekali sekitar 4 tahun lalu lah itupun kunjungan bersama-sama dengan pembatik lain bukan khusus rumah batik ini, bersama-sama pembatik-pembatik lain, ada yang dari Tembilahan, itu ada 1 kali kunjungan untuk membuat batik, itupun bukan batik ini, tetapi batik sablon hanya itu, untuk membina secara langsung tidak...”(Siti Nurbaya, 20 Maret 2019)

Dari pernyataan Ibu Siti Nurbaya diatas, para pengrajin Batik hanya sekali dibetikan pelatihan dengan melakukan kunjungan bersama-sama dengan para pembatik lain seperti pembatik dari Tembilahan untuk melihat batik sablon, dan hanya itu pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan.

“...Tapi untuk mempromosikan barang secara langsung ia. Jadi barang-barang kita mereka pinjam pas ada pameran atau ada Expo atau kegiatan-kegiatan yang membawa nama daerah keluar, itu memang mereka pinjam batik kita, mereka pajang batik kita, mereka jual batik kita tapi untuk pembinaan langsung untuk menjadikan kami sebagai pembatik-pembatik

yang handal itu secara langsung nya ngga itu”(Siti Nurbaya, 20 Maret 2019).

Namun dalam pembinaan promosi barang secara langsung sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan kepada pengrajin batik di Rumah Batik Andalan. Tetapi pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan para pembatik, belum dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan serta kesimpulan peneliti untuk indikator pengendalian disini peneliti melihat masih kurang telaksana, karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan pendeteksian kesalahan-kesalahan dalam produksi di Rumah Batik Andalan sebelum menjadi fatal .

3. Pengelolaan

Pengelolaan mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada Industri Batik Bono, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengelolaan Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan.

| No | Item Pertanyaan | Jawaban Responden | | | Total |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Menentukan strategi pengembangan Industri Batik Bono | - | 8 | 13 | 21 |
| 2 | Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin | - | 12 | 9 | 21 |
| 3 | Mengadakan review secara berkala | - | 6 | 15 | 21 |
| Jumlah | | - | 26 | 37 | 63 |
| Skor | | - | 52 | 37 | 89 |
| Kategori | | Kurang Terlaksana | | | |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai penentuan strategi pengembangan Industri Batik Bono dapat kita lihat bahwa 8 responden menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan penentuan strategi pengembangan sudah dilakukan, khususnya dibidang promosi Batik Bono. Dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 13 reponden, yang artinya sudah terlaksana namun belum baik.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin yang menyatakan cukup terlaksana berjumlah 12 responden, dengan alasan pernah dilakukan sekali saat melihat teknik membatik secara langsung ke Yogyakarta pada tahun 2015. Dan yang mnejawab kurang terlaksana berjumlah 9 responden dengan alasan pelatihan improvisasi pengrajin batik langsung diberangkatkan oleh CD PT.RAPP.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai mengadakan riview secara berkala untuk yang menyatakan cukup telaksana berjumlah 6 responden, dengan alasan karena

hasil kegiatan Industri Batik Bono sudah sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen tetapi masih ada beberapa yang harus diperhatikan karena tidak semua konsumen yang menyatakan hasil dari yang mereka lihat masih banyak yang kurang memuaskan. Dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 15 responden, dengan alasan para pengrajin tidak pernah mengetahui review secara berkala yang seperti apa yang sudah dilakukan untuk Industri Batik Bono, hingga akhirnya mereka tidak mendapatkan masukan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan untuk perbaikan seperti apa yang harus Industri Batik Bono lakukan agar Produk Batik Bono tetap terus dapat menyempurnakan identitasnya sebagai batik khas Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor **89** yang berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya pengelolaan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengelolaan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari penentuan strategi pengembangan Industri Batik Bono yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri ke Rumah Batik Andalan.

“kita lakukan dari dasar yaa, dari proses produksinya, desainnya, kemasannya, pemasarannya. Sudah dua tahun trahir ini kami terus yaa, batik Bono itu dikelola oleh CDnya RAPP, tetapi setelah beberapa tahun telah dibina oleh CD RAPP untuk mengembangkan supaya batik Bono itu

bisa dipromosikan keluar, barulah selaku CD RAPP meminta kepada kami untuk pengembangan Batik Bono tersebut.”(Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019)

Dalam hal penentuan strategi pengembangan industri Batik Bono sudah dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri dengan cara dipromosikan keluar. Dalam peningkatan kemampuan pengrajin Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mengatakan bahwa mereka sudah melakukannya dari dasar dari proses produksi, mendesain, pengemasan, hingga pemasarannya. Dalam dua tahun ini Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri juga mengatakan bahwa mereka terus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kurang terlaksana sebab,

“kami selaku Industri yang harusnya dikelola, gak ada merasakan. agak susah jawabnya. Adanya Cuma pinjam barang-barang (batik) kami aja. Tahun ini justru nggak ada, malah batik kita dipinjam belum dikeembalikan lagi...”(Siti Nurbaya 20 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan ibu Siti Nurbaya diatas dapat diketahui bahwa dalam dua tahun ini tidak ada dilakukannya pelatihan kepada para pengajin industri batik Bono Rumah Btaik Andalan. Dan dalam proses promosi batik Bono yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag khususnya Seksi Bimbingan dan Pengawasan ibu Siti Nurbaya mengatakan bahwa Dinas hanya meminjam kain batik Bono dan hingga kegiatan promosi batik Bono selesai kain batik yang dipinjam oleh Dinas belum dikembalikan hingga sekarang.

“...pengelolaan Industri ini penting, kalau cerita penting sebetulnya penting karena untuk pengembangan batik kita kedepan ini kan, kita kan bukan hanya yang seperti ini, kita perlu mungkin, salah satunya ya kita mungkin perlu pemberdayaan masyarakat sekitar Pelalawan untuk tau bahwa batik Bono ini bisa menjadi mata pencaharian mereka, itu satu...”
(Siti Nurbaya, 20 Maret 2019)

Salah satu keinginan dari ibu Siti Nurbaya selaku ketua pengrajin batik Bono di Rumah Batik Andalan adalah adanya pemberdayaan masyarakat disekitar Pelalawan, agar masyarakat disekitar Pelalawan dapat bergabung di Rumah Batik Andalan. Yang mana, dalam jumlah pengrajin batik di Rumah Batik Andalan dari ketahun mengalami pengurangan. Dan dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat maka, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari bekerja menjadi pembatik yang akhirnya dapat membantu perekonomian masyarakat.

“...udah tu dari segi motifnya sebetulnya kita mengharapkan dari pemerintahan, pemerintah khususnya dari dinas itu disini mereka kasih solusi ke kita apa lagi kira-kira yang bisa dikembangkan di Pelalawan ini, kan banyak tu kita gak tau seharusnya orang Dinas lebih banyak tau, bahwa di Pelalawan ini ada ini, ada apa aja lagi yang bisa dikebangkan (motif batik baru khas Pelalawan) seharusnya mereka masukkan itu, tapi sampai hari ni belum. Setau ibuk, ibuk belum mendapat kan itu, atau mereka kasih ke kelompok lain mungkin. Ke Industri Batik Bononya ngga. Itu pun kami dapatnyakan (motif batik) kadang kadang curi dari Internet, aaaaa ini mirip ni dengan kita, coba kita kerjakan, agak mirip untuk daerah kita yaitu lah cuma bentuknya itu belum dapat, pembinaan secara langsung belum dapat. Dan dinas juga tidak pernah mengusul kan motif motif untuk penambahan Rumah Batik ini apa lagi membantu kami dalam finishing ya.”
(Siti Nurbaya, 20 Maret 2019)

Dalam pernyataan ibu Siti Nurbaya diatas dapat diketahui bahwa Dinas belum ada merekomendasikan motif ke Rumah Batik Andalan, bahwa motif apa yang seharusnya menjadi desain dikain batik mereka yang dapat menjadi ciri khas Kabupaten Pelalawan, namun ternyata untuk beberapa motif yang menjadi desain dikain batik para pengrajin di Rumah Batik Andalan adalah mereka mencuri motif

batik dari internet yang mereka rasa cocok dengan daerah Pelalawan maka mereka akan menggunakannya sebagai motif batik mereka. Dengan ini dapat dilihat bahwa kreatifitas dari para pengrajin dalam menciptakan motif batik yang baru masih terbatas. Dengan hal ini sudah seharusnya para pengrajin diberikan pelatihan yang sebagaimana seharusnya. Agar terlahir kembali motif yang menjadi khas Pelalawan asli.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan serta kesimpulan peneliti untuk indikator pengelolaan disini peneliti melihat masih kurang telaksana, karena pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak mengadakan pelatihan kepada para pengrajin batik Bono, padahal pelatihan disini sangat dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan pengrajin, agar para pengrajin terus dapat memaksimalkan hasil produksi batik Bono agar selalu menjadi Produk unggulan daerah Pelalawan yang dikenal oleh khalayak yang lebih luas lagi.

4. Kualitas

Kualitas juga merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam memenaangkan persaingan. Dengan demikian sebuah lembaga harus menjaga dan menjamin kualitas dari produk atau jasa yang dihasilkan Abd.Rohman (2018:59). Berikut ini peneliti sajikan tanggapan responden mengenai indikator kualitas :

Tabel V.7 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kualitas Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan.

| No | Item Pertanyaan | Jawaban Responden | | | Total |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | |
| 1 | Peningkatan mutu dan daya saing Batik | - | 8 | 13 | 21 |
| 2 | Bantuan perlengkapan dan peralatan batik | - | - | 21 | 21 |
| 3 | HaKI | - | 18 | 2 | 21 |
| Jumlah | | - | 26 | 36 | 62 |
| Skor | | - | 52 | 36 | 88 |
| Kategori | | Kurang Terlaksana | | | |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.7 diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai peningkatan mutu dan daya saing batik dapat kita lihat yang menyatakan cukup terlaksana berjumlah 8 responden, dengan alasan batik Bono sudah cukup berkembang. Dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 13 orang, dengan alasan karena dalam peningkatan mutu dan daya saing batik belum dirasa maksimal oleh para pengrajin batik.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai bantuan perlengkapan dan peralatan batik keseluruhan responden menyatakan kurang terlaksana yaitu berjumlah 21 responden, yang artinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tidak pernah memberikan bantuan perlengkapan dan peralatan kepada Industri Batik Bono, jika dilihat pada SOP Pembinaan Industri Kecil Menengah sudah dijelaskan bahwa adanya bantuan Bimtek, perlengkapan, dan peralatan serta legalitas usaha. Namun untuk bantuan perlengkapan dan peralatan untuk Inudstri Batik Bono tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk yang menyatakan cukup terlaksana berjumlah 18 responden, dengan alasan HaKI sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM , namun belum ada bukti verifikasi bukti HaKI. Untuk yang menyatakan Kurang terlaksana berjumlah 2 orang, yang artinya mengenai HaKI sudah telaksana, namun dalam pendaftaran HaKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor **88** yang berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya peningkatan kualitas sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan sebagai Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai peningkatan kualitas yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari pendaftaran HaKI untuk Industri Batik Bono yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ke Rumah Batik Andalan.

“pertanyaannya berkaitan ya, seperti yang bapak kata kan tadi kita lakukan dari dasar yaa, dari proses produksinya, desainnya, kemasannya, pemasarannya. Apa bila ada motif motif baru kita akan sampaikan kepada ibuk-ibuk pelaku usaha supaya dia dapat membuat motif motif yang baru tersebut. Jadi hambatan itu ngga ada. Batik Bono itu kan sudah mulai berkembang jadi tinggal kami untuk meningkatkan finishingnya aja dalam pembuatan batik Bono...”(Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019)

Dari pernyataan barapak Deddy Kurniawan beliau mengatakan bahwa sudah menyampaikan kepada ibuk ibuk pelaku usaha apabila ada motif motif baru agar menjadi motif baru untuk para pengrajin batik. Bapak Deddy Kurniawan juga mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas batik Bono. Bapak Deddy Kurniawan berpendapat hanya perlu membantu dalam proses *finishing* batik.

“...Dan kami mengharapkan pembinaan optimal nya kami sudah masukkan kepada RAPP, supaya menyediakan dana untuk workshop nya, jadi supaya workshopnya itu kami akan ajukan ke Kementrian Perindustrian melalui Dana DAK untuk pembuatan workshop batik Bono tersebut untuk dijadikan Sentra Industri Kecil Menengah atau SIKIM yang disana terdapat, bagaimana tempat proses produksinya dibangun disitu, tempat pemasarannya, dan tempat penyimpanan bahan bakunya. Jadi tujuannya supaya ada pengunjung-pengunjung dari luar Kabupaten Pelalawan khususnya kalo mau melihat-lihat proses produksi batik Bono dapatlah di kita salurkan atau kita bawa ketempat yang akan kita bangun tersebut tapi dalam waktu dekat ini dalam proses pencarian tanah untuk pembuatan SIKIM Batik Bono tersebut...”(Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri telah melakukan pengajuan dana untuk penyediaan *workshop* batik Bono berupa seluas tanah yang akan dijadikan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) namun untuk sekarang Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri masih dalam proses pencarian tanah untuk pembangunan SIKIM tersebut.

“...Dan untuk HaKI sudah kami daftarkan, karna HaKI itu lama ya keluarnya, jadi sekarang kita lagi sama-sama menunggu”(Deddy Kurniawan, 20 Maret 2019).

Dan untuk HaKI Batik Bono sendiri sudah dilindungi dengan UU No. 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku selama hidup penciptanya dan terus

berlangsung hingga 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia yang diberikan oleh negara melalui Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai peningkatan kualitas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kurang terlaksana sebab,

“ha liatkan berarti dia bersangkutan ni kan, udah itu mungkin dari seni cara meletakkan motif di kain itu kita perlu dilatih jugak, karena nanti pada saat kita bikin barang jadi contohnya nanti ini kan jadi baju, jadi baju bukan batik tu khusus cara jahitnya kan? Motifnya itu harus ketemu udah tu tidak terpotong-potong, udah itu peletakan nantik kalo untuk adanya dimana punggungnya dimana lengannya dimana, cara meletakkan motif itu perlu sebenarnya pelatihan, ya karna kitakan semua ini kan orang-orang baru semua. Orang yang tidak ngerti dengan Industri ini. Jadi kita sambil jalan ni, mengerjakan batik ini sambil jalan, apa yang bisa kami lakukan kami lakukan gitu. Jadi ilmu tambahan-tambahan itu kita harapkan dari lingkungan, dari sekitar dari pemerintah, tapi itu belum kita dapat. Yang support kita kan tau sendiri, hanya perusahaan (PT. RAPP)...” (Siti Nurbaya, 20 Maret 2019).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa para pengrajin batik Bono juga memerlukan pelatihan dalam peletakan motif Batik yang baik dan benar.

“...Kalo untuk HaKI ia sudah mereka daftar 5 motif batik kita, dan 5 lagi lagi menunggu ya, karna kita dapat kan HaKI itu dari mereka, tapi pembinaan untuk ini menjadi tambah besar itu ndak ada. Jadi kita mau meng HaKikan, Hak Cipta ini ya kan kita tetap berhubungan mereka, itu mau tak mau, memang mereka yang urus gitu. Jadi HaKI ada 5 itu memang mereka yang urus sampai jadi itu memang mereka yang bantu. Tapi kalo batik ini sendiri untuk pembinaan ngga ada.”(Siti Nurbaya, 20 Maret 2019).

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan serta kesimpulan peneliti untuk indikator peningktan kualitas batik Bono disini peneliti melihat masih kurang telaksana, karena peningkatan kualitas yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan peningkatan kualitas dengan semestinya, pembatik masih belum merasakan bentuk peningkatan kualitas batik yang sesungguhnya, jika hanya HaKI, itu sudah terlaksana dengan baik, namun untuk peningkatan mutu dan daya saing batik apalagi dalam pemberian bantuan perlengkapan dan peralatan belum ada dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada Industri Batik Bono.

Untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi dari 21 responden yang telah peneliti buat melalui kuisioner yang diberikan kepada responden terhadap Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) sebagai berikut:

Tabel V.8 : Rekapitulasi tanggapan responden Terhadap Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono).

| No | Indikator | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Kurang Terlaksana | Skor | Kategori |
|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | Pengawasan | 15 | 70 | 23 | 108 | Cukup Terlaksana |
| 2 | Pengendalian | 3 | 42 | 41 | 86 | Kurang Terlaksana |
| 3 | Pengelolaan | - | 52 | 37 | 89 | Kurang Terlaksana |
| 4 | Kualitas | - | 52 | 36 | 88 | Kurang Terlaksana |
| Jumlah | | 371 | | | | |
| Skor | | 93 | | | | |
| Kategori | | Kurang Terlaksana | | | | |

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pada penelitian Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) untuk indikator pengawasan sebesar 108 skor, untuk indikator pengendalian sebesar 86 skor, untuk indikator pengelolaan sebesar 89 skor, dan untuk indikator kualitas sebesar 88 skor. Total keseluruhan responden pada penelitian ini sebanyak 21 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini berada pada kategori **Kurang Telaksana** dengan total skor secara keseluruhan sebesar 93 skor ini sesuai dengan penjelasan di depan rentang skoring sebesar 64-105 masuk kedalam kategori **Kurang Terlaksana**.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) **Kurang Terlaksana** artinya pelaksanaan pembinaan Industri Kecil Menengah kepada Industri Batik Bono belum terlaksana sepenuhnya dengan baik. Masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya Industri Batik Bono terus berkembang dan bisa lebih baik lagi dalam memproduksi Batik Bono yang sudah menjadi produk unggulan daerah, oleh sebab itu tugas Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan untuk dapat melaksanakan pembinaan kepada Industri Batik Bono agar Industri Batik Bono terus berkembang dan menjadi industri yang dapat menjadi lahan penghasilan bagi masyarakat disekitar Kabupaten Pelalawan jika dapat dibina dikembangkan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono), maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Tugas Pembinaan Industri Kecil Menengah kepada Industri Batik Bono dapat dikatakan Kurang Terlaksana. Dapat dijelaskan berdasarkan kuisisioner penelitian memang masih dijumpai hal-hal yang dinilai masih kurang terlaksana dalam pelaksanaan tugas pembinaan yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Kemudian didukung dengan hasil wawancara terhadap 4 responden dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri, serta Ketua Pengrajin Rumah Batik Andalan maka hasil yang diperoleh terdapat kesenjangan atau perbedaan pernyataan yang diberikan oleh masing-masing responden. Peneliti menarik kesimpulan bahwa didalam pelaksanaan tugas pembinaan Industri Batik Bono yang dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan semestinya, dikarenakan yang merasakan bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Seksi

Bimbingan dan Pengawasan Industri adalah para Pengrajin Batik di Rumah Batik Andalan dan dari hasil kuisioner yang diisi oleh pengrajin dan hasil wawancara dengan ketua pengrajin batik Rumah Batik Andalan serta berdasarkan hasil observasi peneliti ke Rumah Batik Andalan yang melihat proses produksi batik Bono secara langsung, dapat dilihat bahwa jumlah pengrajin yang semakin sedikit sementara para pengrajin kewalahan dalam menyelesaikan pesannya, masih terdapatnya beberapa kain batik yang motif masih amburadul, beberapa motif batik yang masih dicuri dari internet, dan pewarnaannya yang kurang tepat yang artinya masih perlu dibina oleh Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mengingat Batik Bono sudah menjadi produk unggul daerah Kabupaten Pelalawan.

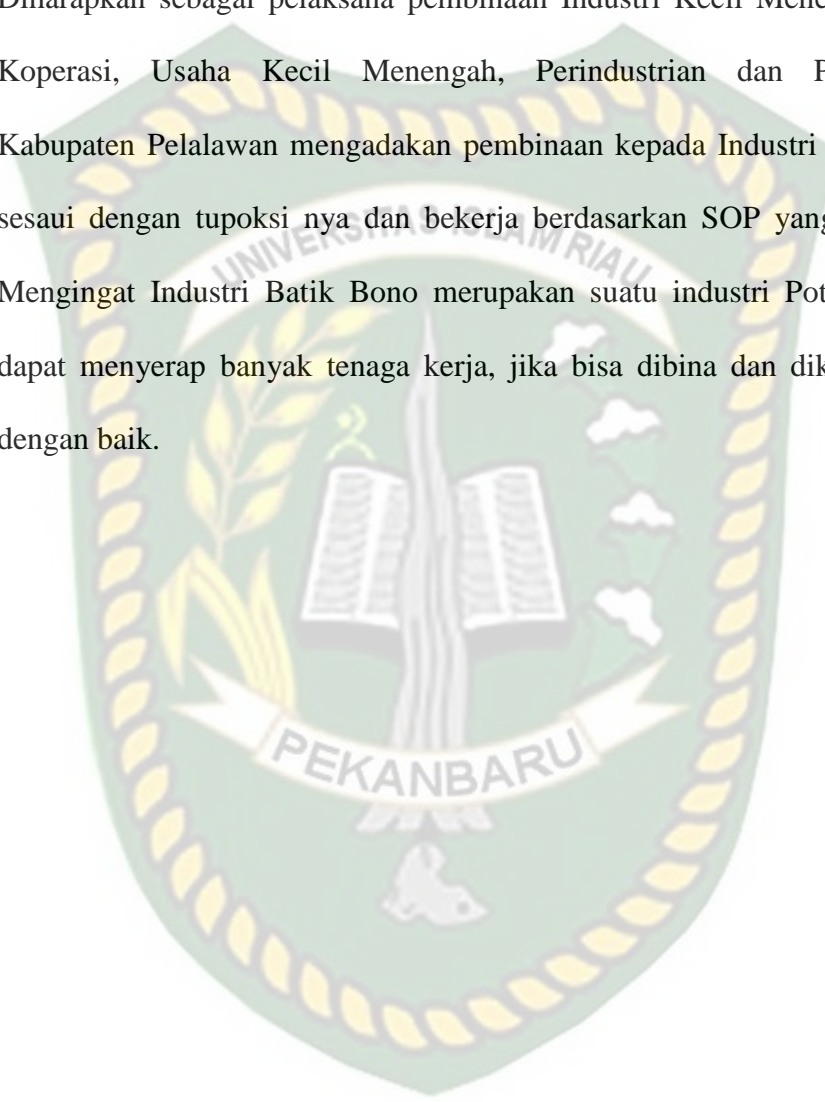
B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai masukan untuk adanya pelaksanaan tugas pembinaan Industri Kecil Menengah kepada Industri Batik Bono adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan Tugas Pembinaan Industri Kecil Menengah Khususnya Industri Batik Bono dapat lebih meningkatkan kembali pengawasan kepada Industri Batik Bonno agar dapat mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Industri Batik Bono sehingga dapat dilakukannya perbandingan serta menilai rencana, waktu dan hasil dari kegiatan Industri Batik Bono. Yang akhirnya

dapat memberikan solusi atau perbaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh Industri Batik Bono.

2. Diharapkan sebagai pelaksana pembinaan Industri Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengadakan pembinaan kepada Industri Batik Bono sesuai dengan tupoksi nya dan bekerja berdasarkan SOP yang telah ada. Mengingat Industri Batik Bono merupakan suatu industri Potensial yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, jika bisa dibina dan dikembangkan dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan dalam organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Melayu S,P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2010. *Perencanaan Strategis In Action*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prajudi, Slamet Atnosurdjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Admmministrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, Endang, dkk. 2018. *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*. Malang: Empatdua.
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua.
- Siagian, P. Sondang. 1981. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- 2003. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Asia Maha Satya.
- 2001. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 20016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelaktual*. Jakarta: Sinar Grafika
Syafiee, Inu Kencana. 2018. *Ilmu Adminitrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Syafiee, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka
Cipta.

Terry, R. George. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Terry, R. George. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Grafindo

Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Thoha, Miftah. 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Depok: Kencana

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju: Bandung

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru:UIR.

Jurnal :

Fadlul Taufik, Syafhendry. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. WEDANA.
Universitas Islam Riau.

Masana Sembiring. 2012. *Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan
Pemerintah Sebagai PUSAN Pelayanan Masyarakat*. MIMBAR Vol.
XXVIII, No. 1. IPDN. Jatinangor.

Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe. 2014. *Pembinaan Industri Kecil
dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kota Bontang*. Jurnal Administrasi Reform Vol.2 No.2.
Universitas Mulawarman Samarinda.

Suyadi, Syahdanur, Susie Suryani. 2018. *Analisis Pengembangan Usaha Makro
dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau*. Jurnal Ekonomi
KIAT. Universitas Islam Riau.

Widiasti. 2017. *Pengembangan Indutri Batik Riau Pada Rumah Kreatif Cempaka
Dikecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. JOM Fekon. Universitas
Riau.

Dokumen :

UU No. 5 Tahun 1948 tentang Perindustrian

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Zulkifli. Azam Awang, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

